



## **LAPORAN AKTUALISASI**

### **PEMANFAATAN CLOUD UNTUK PENDATAAN LAPORAN SINGKAT PADA BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM**

Disusun oleh:

**NAMA : NANDA AINUN OCTAFIANI, S.E.**  
**NDH : 35**  
**INSTANSI : BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA  
DPR RI BIDANG KORPOLKAM**

---

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**2019**



## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

### PEMANFAATAN CLOUD UNTUK PENDATAAN LAPORAN SINGKAT PADA BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

Disusun oleh:

**NAMA** : NANDA AINUN OCTAFIANI, S.E.  
**NDH** : 35  
**INSTANSI** : BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA  
DPR RI BIDANG KORPOLKAM

Peserta Latsar,

Nanda Ainun Octafiani, S.E.  
NIP. 199310092019032001

Bogor, 10 Oktober 2019

Menyetujui,  
Mentor

Insan Abdirrohman, S.H., M.Si.  
NIP. 198009192005021002

Menyetujui,  
Coach,

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si.  
NIP. 197212031998032003



## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

### PEMANFAATAN CLOUD UNTUK PENDATAAN LAPORAN SINGKAT PADA BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

Disusun oleh:

**NAMA** : NANDA AINUN OCTAFIANI, S.E.  
**NDH** : 35  
**INSTANSI** : BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA  
DPR RI BIDANG KORPOLKAM

Peserta Latsar,

Nanda Ainun Octafiani, S.E.  
NIP. 199310092019032001

Bogor, 10 Oktober 2019

Menyetujui,  
Mentor

Insan Abdirrohman, S.H., M.Si.  
NIP. 198009192005021002

Menyetujui,  
Coach,

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si.  
NIP. 197212031998032003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peserta panjatkan pada kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi LATSAR CPNS Angkatan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan judul **Pemanfaatan Cloud Untuk Pendataan Laporan Singkat Pada Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam**. Tujuan penyusunan rancangan aktualisasi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat masa percobaan selama menjadi CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, kritik, saran, dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M. selaku Kepala Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI.
2. Bapak Insan Abdirrohman, S.H., M.Si selaku Plt. Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dan *mentor*.
3. Ibu Turi Handayani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Kerumah tanggaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.
4. Ibu Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si selaku coach.
5. Ibu Ria Reviana, S.IP., MPA selaku penguji rancangan aktualisasi Kelompok I angkatan III.
6. Teman-teman CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan aktualisasi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Jakarta, 8 Oktober 2019

Nanda Ainun Octafiani, S.E.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
Latar Belakang.....	1
Dasar Hukum.....	3
BAB II	
Visi dan Misi Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI.....	4
Struktur Organisasi.....	6
Penjelasan Tugas dan Fungsi.....	8
BAB III	
Identifikasi Isu.....	9
Pemilihan Isu Prioritas.....	13
Gagasan Pemecahan Isu.....	15
Rancangan Aktualisasi.....	16
BAB IV	
Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi.....	19
Stakeholders.....	40
Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala.....	41
Analisa Dampak.....	—
Jadwal Kegiatan.....	45
BAB V	
Kesimpulan.....	47
Saran.....	48
Lampiran	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang professional dalam melayani masyarakat dan mampu mengikuti arus globalisasi diperlukan sebuah pembinaan melalui jalur pelatihan. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. PNS sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembang potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan CPNS 2019 di lingkup Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, dan semangat meningkatkan efektif dan efisiensi kerja Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Korpolkam, peserta menyoroti permasalahan banyaknya laporan singkat rapat yang kerap sulit dicari dan hilang akibat minimnya sistem

penyimpanan data yang terintegrasi sebagai isu utama rancangan aktualisasi yang disusun oleh peserta.

Mengingat semangat tersebut, peserta mengangkat tema “Pemanfaatan Cloud Untuk Pendataan Laporan Singkat Dalam Mendukung Penyusunan Laporan Kinerja” yang merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang merupakan unit kerja penempatan peserta. Melalui diterapkannya sistem inventarisasi data pelaporan kedalam bentuk yang lebih ringkas, diharapkan mampu membawa dampak positif kepada proses penyusunan laporan kinerja dan kecepatan proses pertukaran informasi di Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

## BAB II

### PROFIL ORGANISASI

#### A. VISI MISI BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN DPR RI

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap 3 fungsi DPR (legislasi, anggaran, pengawasan), program kerja Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2014-2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

#### VISI

Rumusan visi dan misi Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu pada visi dan misi Deputi Persidangan, dengan fokus pada Tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu menyelenggarakan dukungan Kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, Dukungan Persidangan kepada Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, maka Visi Biro Kesekretariatan Pimpinan ditetapkan sebagai berikut:

***"Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal serta dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah secara profesional, transparan dan akuntabel".***

## MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Biro Kesekretariatan Pimpinan, yaitu:

- A. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan Pimpinan Dewan;
- B. Meningkatkan kualitas dukungan kegiatan Rapat Pimpinan, Rapat/Pertemuan Konsultasi, Rapat Koordinasi, dan Rapat Bamus yang optimal; dan
- C. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha, rapat-rapat dan kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, dukungan persidangan terhadap Rapat Pimpinan, Badan Musyawarah dan Tim DPR RI serta tata usaha tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI, yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, terjadi penambahan 1 (satu) unsur Pimpinan DPR RI yaitu Wakil Ketua DPR RI bidang Akuntabilitas Keuangan Negara, Kerumahtanggaan dan Hubungan Antar Lembaga (Korakerhal), maka struktur organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan mengalami penambahan unit kerja. Unit kerja dimaksud yaitu Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara, Kerumahtanggaan dan Hubungan Antar Lembaga (Korakerhal).

Dengan adanya perubahan struktur tersebut, maka unit-unit kerja yang berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan, sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Ketua; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
2. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
3. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
4. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
5. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

6. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
7. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
8. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
9. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 3 (tiga) Kasubag.
10. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

### Bagan 1

#### Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan



### **C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam rangka menunjang kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, peserta sebagai penyusun bahan kebijakan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Laporan Singkat Rapat

Peserta menghadiri rapat dan audiensi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Pada rapat tersebut peserta mencatat aspirasi dan arahan yang diberikan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam kepada masyarakat/peserta audiensi. Dari data dan catatan rapat yang didapat dari pertemuan tersebut, peserta merumuskan pokok-pokok pembicaraan pertemuan tersebut untuk dibuat menjadi laporan singkat rapat yang kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk mendapatkan koreksi atau persetujuan. Hasil laporan singkat yang telah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan tersebut kemudian di fotokopi untuk keperluan jamuan rapat dan arsip.

2. Mengumpulkan dan mengolah data untuk perumusan Rencana Kinerja Tahunan

Peserta bertanggung jawab dalam mengumpulkan seluruh laporan singkat dan dokumen pendukung terkait yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan laporan kinerja yang disusun setiap akhir masa sidang.

## **BAB III**

### **RANCANGAN AKTUALISASI**

#### **A. IDENTIFIKASI ISU**

**ISU 1 : Banyaknya laporan singkat yang tidak tertata dan terintegrasi dengan baik.**

❖ **Masalah**

Laporan kinerja merupakan salah satu bentuk produk pertanggungjawaban kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang harus dibuat setiap akhir masa sidang. Namun, pada praktiknya penyusunan laporan kinerja tersebut kerap menemui masalah akibat banyaknya laporan singkat yang sulit dicari, bahkan hilang sama sekali.

Untuk itu, sebagai isu pertama yang diajukan peserta dalam rancangan aktualisasi ini adalah banyaknya laporan singkat yang tidak tertata dan terintegrasi dengan baik sehingga banyak laporan yang sulit dicari dan mengakibatkan terhambatnya penyusunan laporan kinerja. Untuk itu dibutuhkan suatu inovasi dan kreativitas pegawai untuk mengantisipasi tercecernya dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan kinerja.

❖ **Penyebab**

Penyebab utama tidak tertata dengan rapinya laporan singkat kerap disebabkan oleh pengerjaan laporan singkat yang tidak langsung diselesaikan setelah rapat atau kunjungan kerja berakhir. Hal ini ditambah dengan tidak adanya system yang terintegrasi dalam penyimpanan informasi dan data sehingga menghambat penyelesaian penyusunan laporan kinerja.

❖ **Kondisi yang diharapkan**

Dengan dibuatnya pendataan laporan singkat dalam format *table of content* yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel per masa sidang, dan terintegrasi dalam system *cloud* DPR, table tersebut diharapkan mampu memudahkan pegawai dalam merekap kegiatan Pimpinan Dewan dalam 1 masa sidang.

Tabel ini akan memuat keterangan terkait tanggal rapat, dengan siapa Pimpinan DPR mengadakan rapat, rangkuman ringkas dari laporan singkat, hingga tanggal penyelesaian dan nama pegawai yang mengerjakan laporan singkat tersebut.

Lebih lanjut, mengingat table ini akan diunggah dalam bentuk *shared file* pada *cloud* DPR, table ini akan lebih mudah diakses oleh seluruh pegawai yang tergabung dalam Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.

❖ **Dampak**

Dengan tidak adanya laporan singkat yang terorganisir, akan menyulitkan pegawai dalam menyusun laporan kinerja Pimpinan DPR RI yang berdampak pada terlambatnya proses penyelesaian dari laporan singkat itu sendiri.

**ISU 2 : Kurang tersentralisasinya data dan dokumen pendukung laporan**

❖ **Masalah**

Tidak tersentralisasinya data dan dokumen pendukung merupakan salah satu faktor tertundanya penyelesaian laporan kinerja yang harus dikumpulkan pada tiap akhir masa sidang.

Hal ini diperparah dengan dokumen pendukung seperti laporan singkat, foto serta video yang tidak terorganisir dengan baik

sehingga banyak dari dokumen pendukung tersebut yang tercecer dan susah untuk ditemukan.

❖ **Penyebab**

Banyaknya dokumen pendukung yang tidak langsung diarsip, dan diorganisir dengan baik menyebabkan tercecernya dokumen yang menyulitkan pegawai dalam mencari data pendukung ketika dibutuhkan pada saat penyusunan laporan kinerja.

❖ **Kondisi yang diharapkan**

Melalui digitalisasi penyimpanan dokumen pendukung yang terintegrasi dalam suatu web based system, akan memudahkan pegawai dalam mencari dokumen pendukung yang dibutuhkan pada proses penyusunan laporan kinerja yang kemudian diharapkan dapat mengakselerasi proses penyelesaian laporan kinerja.

❖ **Dampak**

Tidak adanya penyimpanan dokumen pendukung yang terorganisir menyebabkan tingginya potensi data yang hilang, akibat tidak adanya back up data yang tersimpan secara digital. Selain itu, dokumen yang tercecer juga berbahaya terhadap potensi terjadinya kebocoran data pada pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyulitkan pegawai dalam proses penyusunan laporan kinerja.

---

**ISU 3 : Rendahnya jumlah dokumen dan laporan yang terupdate pada sistem PPID**

❖ **Masalah**

Belum adanya alur kerja baku yang mengatur urutan pembuatan laporan singkat rapat dan kunjungan kerja hingga

proses pengunggahan pada system PPID telah mengakibatkan banyaknya pegawai yang mengabaikan pentingnya pengunggahan laporan dan foto pada sistem PPID sebagai salah satu bentuk semangat DPR RI dalam hal keterbukaan informasi publik.

❖ **Penyebab**

Minimnya aturan baku yang mengatur pengunggahan laporan dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas dan kinerja dewan pada sistem PPID di beberapa unit kerja, kerap mengakibatkan beberapa pegawai lalai dalam semangat keterbukaan informasi publik Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI menjadi. Hal ini kemudian berimbas pada informasi yang terupdate di system PPID menjadi kurang terkini, dan masyarakat memerlukan waktu cukup lama sampai mengetahui laporan hasil kerja dewan.

❖ **Kondisi yang diharapkan**

Dengan adanya urutan kerja baku yang mengatur alur pembuatan laporan singkat hingga pengunggahan di sistem PPID DPR RI diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik yang disediakan DPR RI. Dengan adanya aturan yang secara jelas mewajibkan pengunggahan informasi tersebut, masyarakat dapat mendapatkan informasi yang terupdate terkait kinerja dan aktivitas anggota dewan yang dipilihnya.

❖ **Dampak**

Dalam era digital di mana keterbukaan informasi telah menjadi salah satu faktor penting terhadap kepuasan masyarakat pada kinerja Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI sebagai lembaga eksekutif yang bertugas untuk menunjang kinerja legislatif, rendahnya keterbukaan informasi publik akan secara signifikan

berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI.

## B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

TABEL 1. TEKNIK ANALISIS USG

ISU	U	S	G	TOTAL	PERINGKAT
<p>ISU 1 : banyaknya laporan singkat yang tidak tertata rapi yang kemudian menghambat penyelesaian laporan kinerja pada akhir masa sidang.</p> <p>Alasan pemberian nilai :</p> <p>U : peserta memberikan nilai 5 pada kolom ini dikarenakan tingkat <i>urgency</i> pendataan laporan singkat sangat penting dalam mendukung proses penyusunan laporan kinerja.</p> <p>S : nilai 5 pada kolom ini didasari oleh sangat seriusnya keberadaan pendataan yang terintegrasi untuk laporan singkat dalam mendukung penyusunan laporan kinerja yang merupakan salah satu <i>output</i> DPR RI yang harus diserahkan setiap akhir masa sidang.</p> <p>G : peserta memandang jika tidak segera ditangani, maka masalah tercecernya laporan singkat akan menjadi masalah yang serius, mengingat hal ini akan berpengaruh pada finalisasi laporan kinerja yang tertunda. Untuk itu peserta memberikan nilai 4 pada kolom ini.</p>	5	5	4	14	1
<p>ISU 2 : Banyaknya dokumen pendukung yang tidak langsung diarsip, dan diorganisir dengan baik menyebabkan tercecernya dokumen yang menyulitkan pegawai dalam mencari data pendukung ketika dibutuhkan pada saat penyusunan laporan kinerja</p> <p>Alasan pemberian nilai :</p>	4	3	3	10	3

<p>U : Nilai 4 pada kolom ini didasari oleh <i>urgency</i> dokumen pendukung yang terorganisir yang cukup penting. Mengingat dokumen pendukung (ex : foto) merupakan salah satu komponen laporan singkat dan laporan kinerja yang seharusnya ada.</p> <p>S : Nilai 3 pada kolom ini didasari oleh keberadaan dokumen pendukung yang cukup serius untuk ada di tiap laporan kinerja.</p> <p>G : Nilai 3 pada kolom ini didasari oleh potensi memburuknya kondisi yang cukup signifikan apabila suatu laporan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.</p>					
<p>ISU 3 : Belum adanya alur kerja baku yang mengatur urutan pelaporan rapat maupun kunjungan kerja mengakibatkan banyaknya pegawai yang mengabaikan pentingnya pengunggahan laporan dan foto pada sistem PPID sebagai salah satu semangat DPR RI dalam hal keterbukaan informasi publik.</p> <p>Alasan pemberian nilai :</p> <p>U : Nilai 3 pada kolom ini didasari oleh cukup <i>urgent</i> nya alur kerja baku yang mengatur alur pelaporan sampai system PPID yang menjadi salah satu indicator terciptanya keterbukaan informasi DPR RI.</p> <p>S : Nilai 4 pada kolom ini didasari oleh tingkat keseriusan alur kerja baku yang penting dalam kelancaran alur pelaporan dari tahap penyusunan laporan singkat sampai pengunggahan di system PPID.</p> <p>G : Nilai 3 pada kolom ini didasari oleh potensi memburuknya kondisi yang cukup signifikan. Namun hal ini masih bisa diatasi dengan pengunggahan berkala yang dilakukan pegawai kedalam system PPID.</p>	3	4	4	11	2

Berikut adalah indikator penilaian isu berdasarkan teknik analisis USG:

**a. Urgency**

Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti.

**b. Seriousness**

Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.

**c. Growth**

Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1-5,

1 = Sangat Tidak U/S/G

5 = Sangat U/S/G

### **C. GAGASAN PEMECAH ISU**

Isu yang dipilih berdasarkan teknik analisis USG adalah isu yang paling krusial untuk diatasi, yaitu perihal isu **“Banyaknya Laporan Singkat yang Tidak Tertata Rapi yang Kemudian Menghambat Penyelesaian Laporan Kinerja Pada Akhir Masa Sidang”**

Adapun gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan adalah: **“PEMANFAATAN CLOUD UNTUK PENDATAAN LAPORAN SINGKAT DALAM MENDUKUNG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA”** di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.

#### D. RANCANGAN AKTUALISASI

**Unit Kerja** : Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam

**Identifikasi Isu** :

- a. Banyaknya laporan singkat yang tidak tertata rapi yang menghambat penyelesaian laporan kinerja pada akhir masa sidang;
- b. Banyaknya dokumen pendukung yang tidak langsung diarsip, dan diorganisir dengan baik sehingga banyak dokumen tercecer dan menyulitkan pegawai dalam penyusunan laporan kinerja;
- c. Belum adanya alur kerja baku yang mengatur urutan pelaporan rapat maupun kunjungan kerja mengakibatkan banyaknya pegawai yang mengabaikan pentingnya pengunggahan laporan dan foto pada sistem PPID sebagai salah satu semangat DPR RI dalam hal keterbukaan informasi publik.

**Isu Yang Diangkat** : Banyaknya laporan singkat yang tidak tertata rapi yang kemudian menghambat penyelesaian laporan kinerja pada akhir masa sidang

**Gagasan Pemecahan** : Pemanfaatan Cloud Untuk Pendataan Laporan Singkat Dalam Mendukung Penyusunan Laporan Kinerja

TABEL 2. TABEL KEGIATAN AKTUALISASI CPNS

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan mentor terkait implementasi rencana aktualisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan tujuan dan <i>objective</i> dilakukan nya inventarisasi laporan singkat menjadi suatu <i>table of content</i></li> <li>- Memaparkan rencana tahapan pelaksanaan aktualisasi peserta latsar CPNS 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana tahapan aktualisasi yang sudah mendapat <i>approval</i></li> </ul>	Proses konsultasi dengan mentor dilaksanakan dengan sikap partisipatif peserta dan mengutamakan kejelasan target ( <b>Akuntabilitas</b> ) dalam mengimplementasi rencana aktualisasi ini. Koordinasi ini juga dilakukan dengan sikap tidak memaksakan kehendak dan peserta siap menerima segala masukan dari mentor ( <b>Nasionalisme</b> ). Lebih lanjut, peserta juga mengedepankan sikap hormat dan sopan dalam melakukan komunikasi dengan mentor ( <b>Etika Publik</b> ). Koordinasi juga dilakukan dengan mengedepankan faktor efisiensi ( <b>Whole of Government &amp; Komitmen mutu</b> ) dalam menyusun tahapan implementasi aktualisasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi dan misi Biro Kesekretariatan Pimpinan, khususnya yang berada di unit kerja Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang yakni mewujudkan penyelenggaraan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan secara profesional, transparan dan akuntabel.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Akuntabel</b> Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan pertanggung awaban yang jelas dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi</li> </ol>
2.	Menginventarisasi data laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dari masa sidang I – V Tahun Sidang 2018 – 2019</li> <li>- Mengurutkan laporan singkat dari masa sidang I untuk mempermudah proses penyusunan <i>table of content</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang sudah tertata rapi</li> </ul>	Proses inventarisasi laporan singkat dilakukan dengan mengedepankan sikap cermat dan disiplin ( <b>Etika Publik</b> ) serta tanggung jawab dan integritas tinggi ( <b>Manajemen ASN</b> ). Selain itu, dalam mengumpulkan dan mengurutkan laporan singkat peserta mengedepankan sikap konsisten ( <b>Akuntabilitas</b> ) dan berorientasi mutu ( <b>Komitmen Mutu</b> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rangkaian kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung dan menunjang misi Biro Kesekretariatan Pimpinan dan unit kerja di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, yakni memastikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>Profesional</b> Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan profesional sesuai dengan keahlian yang dimiliki</li> </ol>
3.	Penyusunan <i>Table of Content</i> laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam kedalam system <i>cloud</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merangkum data laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk Masa Sidang I – V Tahun Sidang 2018 – 2019 kedalam <i>table of content</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Table of Content</i> laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang telah terupdate di <i>cloud</i> DPR RI</li> </ul>	Pendataan rangkuman laporan singkat dalam bentuk <i>table of content</i> menjunjung tinggi semangat inovasi dan berorientasi mutu ( <b>Komitmen Mutu</b> ) yang bertujuan untuk memudahkan rekan kerja dalam penyusunan laporan kinerja. Melalui penerapan <i>sharing document</i> yang diterapkan melalui penggunaan <i>cloud</i> ini berlatar belakang upaya meningkatkan		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Integritas</b></li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengunggah <i>Table of Content</i> yang sudah tersusun rapi dalam bentuk <i>shared file</i> kedalam <i>cloud sekretariat_korpolkam@dpr.go.id</i></li> </ul>		<p>tanggung jawab, disiplin serta jujur (<b>Anti-Korupsi</b>). Selain itu, melalui optimalisasi system <i>cloud</i> pada pendataan rangkuman laporan singkat bertujuan untuk mempercepat proses pertukaran informasi (<b>Whole of Government</b>) dan mementingkan kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan Bersama (<b>Nasionalisme</b>)</p>	<p>pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan penyusunan laporan kinerja yang lebih cepat, berintegritas tinggi efektif, dan efisien.</p>	<p>Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan nilai-nilai integritas berupa jujur, dan konsisten.</p>
4.	Penyampaian Laporan Hasil Akhir Aktualisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penyusunan <i>table of content</i> kepada mentor</li> <li>- Pemaparan hasil aktualisasi kepada <i>coach</i></li> <li>- Penyusunan presentasi evaluasi pelaksanaan aktualisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil akhir aktualisasi dalam bentuk pdf dan PPT</li> </ul>	<p>Pemaparan hasil penyusunan <i>table of content</i> yang telah terintegrasi dalam system <i>cloud</i> DPR dilakukan dengan mengedepankan semangat jujur, transparan dan berorientasi hasil (<b>Akuntabilitas</b>). Selain itu, laporan yang dibuat juga bersifat jujur, dan <i>real</i> (<b>Anti Korupsi</b>). Lebih lanjut, laporan dan presentasi yang dibuat akan berorientasi mutu (<b>Komitmen Mutu</b>) dan melalui proses komunikasi dan kerjasama dengan <i>mentor</i> serta <i>coach</i> (<b>Whole of Government</b>).</p>		

BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

NO	TAHAPAN	KEGIATAN UTAMA	STAKEHOLDER	WAKTU PELAKSANAAN	BUKTI FISIK
1	Melaksanakan rapat dengan mentor terkait implementasi kegiatan aktualisasi	1. Penyampaian konsep pelaksanaan aktualisasi kepada Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sebagai atasan langsung	Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam	Kamis, 29 Agustus 2019	1. Foto Kegiatan 2. Laporan hasil konsultasi dalam bentuk laporan rapat
		2. Meminta persetujuan terkait konsep dan urutan pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada PLT Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sebagai Mentor.	PLT Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam		
2	Inventarisasi data laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam	1. Mengumpulkan laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dari masa sidang I – V Tahun Sidang 2018 – 2019	Pengadministrasi Umum TU Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam	Senin, 2 September 2019	1. Foto Kegiatan Aktualisasi 2. Foto <i>sample</i> laporan singkat
		2. Mengurutkan laporan singkat dari Masa Sidang I Tahun Anggaran 2018 - 2019 untuk mempermudah proses penyusunan table of content		Selasa, 3 September 2019	

3	Penyusunan <i>Table of Content</i> laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam	1.	Merangkum data laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk Masa Sidang I – V Tahun Sidang 2018 – 2019 kedalam <i>table of content</i>	1. PLT Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam	17 – 24 September 2019	1. Foto Kegiatan Aktualisasi 2. Rekap data Lapsing 3. Nota Dinas ke BDTI
		2.	Mengunggah <i>Table of Content</i> yang sudah tersusun rapi dalam bentuk <i>shared file</i> kedalam cloud sekretariat_korpolkam@dpr.go.id	2. Pranata Komputer Bidang Data dan Teknologi Informasi	10 September 2019 dan 26 September 2019	
4	Penyampaian Laporan Hasil Akhir Aktualisasi	1.	Penyerahan hasil penyusunan <i>table of content</i> kepada mentor dan rekan kerja	1. PLT Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam	8 Oktober 2019	1. Foto Kegiatan Aktualisasi 2. Daftar Hadir 3. Undangan Sosialisasi
		2.	Penyampaian hasil aktualisasi kepada <i>coach</i>	2. Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam 3. Kepala Bidang Evaluasi Diklat sebagai <i>coach</i> 4. Rekan Kerja di Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam		

## **KEGIATAN PERTAMA**

Pelaksanaan Aktualisasi dimulai dengan kegiatan pertama yaitu tahap konsultasi awal dengan Kepala Sub Bagian Kerumahtangaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sebagai atasan langsung pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB. Pada proses ini peserta menjelaskan tujuan dilaksanakannya aktualisasi kepada Kepala Sub Bagian Kerumahtangaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang merupakan atasan langsung peserta. Dalam tahap ini peserta juga menjelaskan nilai-nilai ANEKA yang akan diterapkan pada tiap-tiap tahapan kegiatan yang telah dirancang peserta pada tahap perancangan aktualisasi yang telah diujikan pada Senin, 26 Agustus 2019 silam.



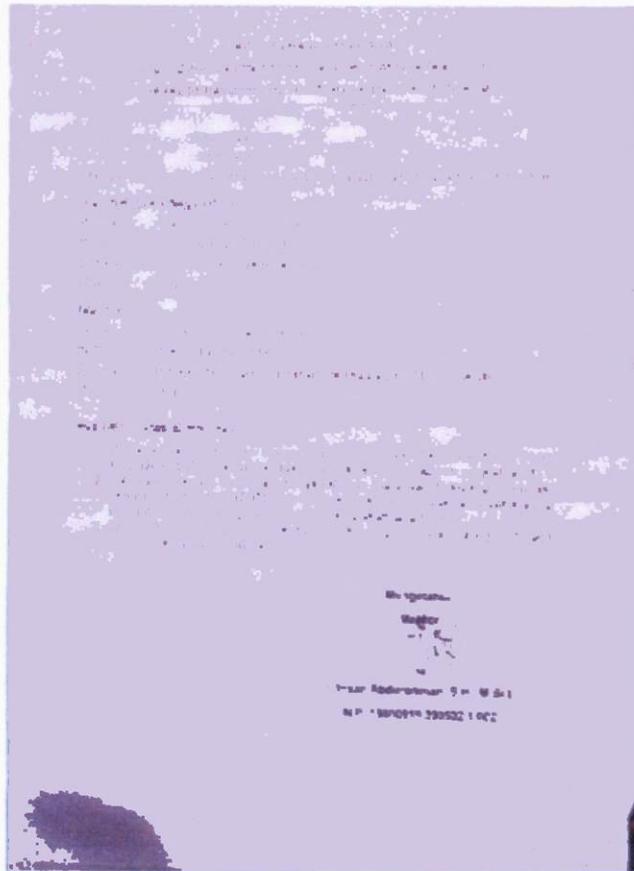
Gambar 1. Penyampaian konsep pelaksanaan aktualisasi kepada Kepala Sub Bagian Kerumahtangaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI

Tahapan selanjutnya adalah meminta persetujuan pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan dengan PLT Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sebagai Mentor yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB. Dari konsultasi ini, peserta mendapatkan arahan terkait tahapan kegiatan aktualisasi. Salah satunya

seperti melakukan koordinasi dengan Pengadministrasi Umum Bagian TU Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam terkait pengumpulan arsip fisik laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dari Masa Sidang I Tahun Anggaran 2018 – 2019 hingga melakukan koordinasi dengan Bagian Data dan Teknologi Informasi (BDTI) yang berkaitan dengan aktivasi sistem *cloud* Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.



Gambar 2. Meminta persetujuan terkait konsep dan urutan pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada PLT Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI



Gambar 3. Laporan Singkat hasil konsultasi dengan Plt. Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sebagai mentor

Dalam proses penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi ini, peserta menginformasikan perihal rancangan kegiatan aktualisasi yang tengah dirumuskan untuk memperoleh saran/masukan dari Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan dan Kepala Sub Bagian TU Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam guna menyempurnakan laporan yang tengah disusun terkait pembuatan *table of content* laporan singkat yang akan diunggah kedalam sistem *cloud* dengan mengimplementasikan beberapa nilai dasar ASN sebagai berikut :

a) Akuntabilitas

Proses penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai **transparansi**, seperti menjelaskan dengan transparan kepada *mentor* terkait objektif dan

proposal rangkaian kegiatan aktualisasi dan yang ingin dicapai peserta CPNS.

b) Etika Publik

Penyampaian dilakukan dengan sikap **hormat, sopan, dan santun** kepada Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan dan Kepala Sub Bagian TU Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.

c) Komitmen Mutu

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan mengedepankan nilai **inovasi**, yakni dengan membahas langkah-langkah yang **efektif dan efisien** dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan aktualisasi.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pertama ini, terdapat beberapa nilai organisasi yang diterapkan pada proses ini, yakni :

a) Profesional

Penyampaian konsep dan rancangan pelaksanaan atau implementasi peserta CPNS 2019 dilakukan dengan asas profesionalisme, dimana peserta menyusun laporan dan kegiatan aktualisasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan nilai-nilai organisasi.

b) Integritas

Dalam melakukan penyampaian rencana implementasi aktualisasi ini, peserta memastikan bahwa **tidak ada kode etik lembaga yang dilanggar** pada tiap prosesnya.

## KEGIATAN KEDUA

Pelaksanaan aktualisasi pada minggu pertama bulan September adalah melakukan inventarisasi data laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dari Masa Sidang I hingga Masa Sidang V Tahun Anggaran 2018 – 2019. Untuk itu, pada hari Senin 2 September 2019 peserta melakukan koordinasi dengan Pengadministrasi Umum TU Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk mengumpulkan arsip laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk Masa Sidang I – V Tahun Anggaran 2018 – 2019.



Gambar 4. Melakukan Koordinasi dengan Pengadministrasian Umum terkait pencarian arsip data laporan singkat

Setelah seluruh arsip laporan singkat tersebut terkumpul, peserta melakukan *filing* terhadap seluruh laporan singkat dan mengurutkan laporan singkat tersebut sesuai dengan masa sidang rapat tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan peserta untuk memudahkan proses penyusunan *Table of Content* laporan singkat rapat yang akan dilakukan peserta dalam kegiatan ketiga pada proses implementasi aktualisasi yang akan dilakukan peserta.



Gambar 5. Laporan singkat dibagi per masa sidang untuk memudahkan pendataan arsip kedalam *table of content*

Pada proses inventarisasi data laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang merupakan kegiatan kedua pada tahap pelaksanaan aktualisasi peserta, terdapat beberapa nilai dasar ASN yang diterapkan peserta, diantaranya adalah :

a) Nasionalisme

Dalam proses inventarisasi data laporan singkat, peserta mengedepankan nilai **tanggung jawab**, dimana peserta melakukan proses inventarisasi data dengan hati – hati, hingga tidak ada laporan yang tertinggal pada proses inventarisasi ini.

b) Komitmen Mutu

Proses inventarisasi laporan singkat dilakukan dengan mengedepankan asas **efektifitas dan efisiensi** dimana peserta memastikan proses inventarisasi sehingga dilakukan tanpa membutuhkan biaya atau waktu yang berarti.

c) Manajemen ASN

Peserta mengimplementasikan nilai-nilai **cermat**, dalam melakukan inventarisasi data laporan singkat di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.

d) Whole of Government

Dalam rangka mempercepat proses inventarisasi data laporan singkat, peserta melakukan **upaya kolaboratif atau kerjasama** dengan Pengadministrasi Umum Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, sehingga proses inventarisasi data laporan pada tahapan kegiatan ini dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Selain itu, pada kegiatan kedua ini peserta juga menerapkan beberapa nilai organisasi, yakni :

a) Akuntabilitas

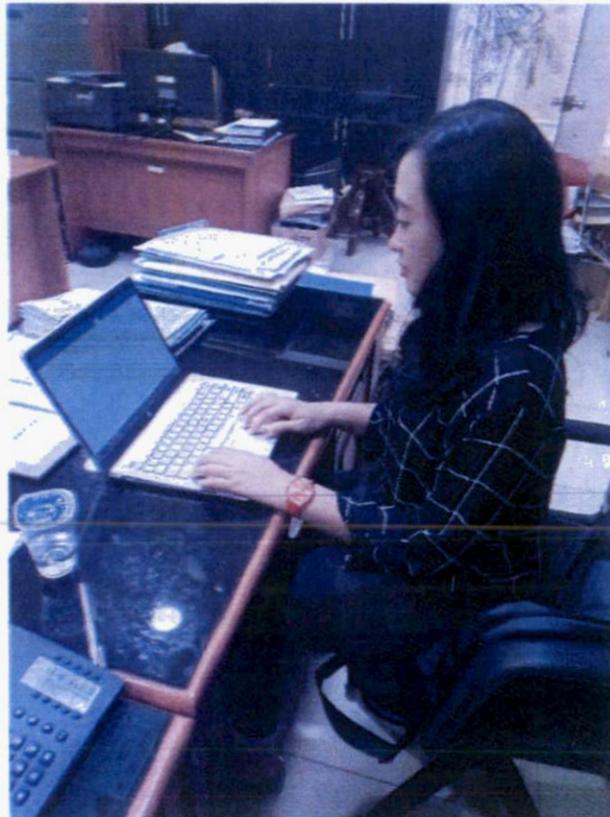
Tahapan inventarisasi data dilakukan dengan mengedepankan prinsip **partisipatif** dari peserta CPNS 2019 dan Pengadministrasi Umum Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dalam penyelesaian tahapan kegiatan ini.

b) Profesionalisme

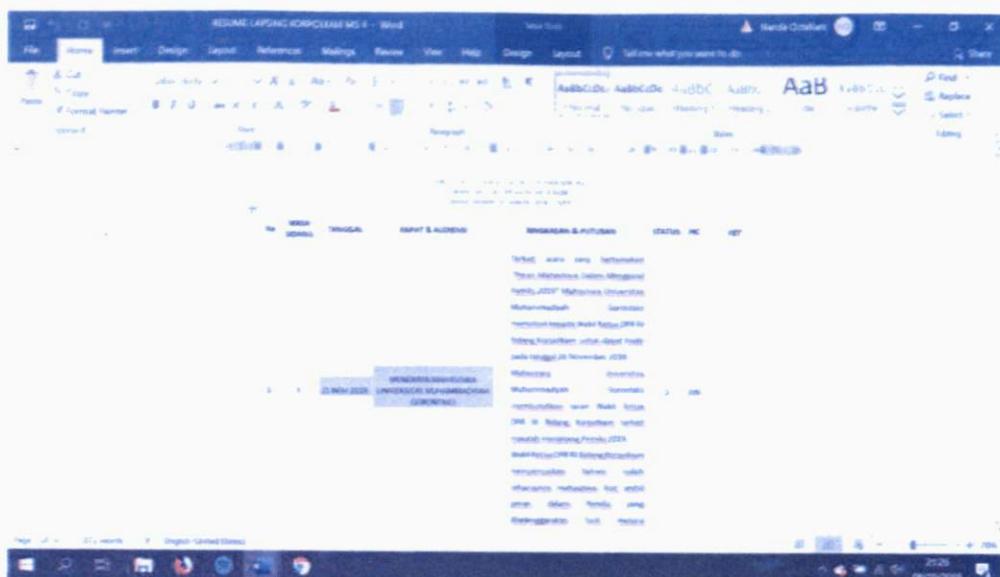
Sikap profesionalisme pada tahap ini diperlihatkan peserta dari kesungguhan peserta terhadap profesinya, yakni keinginan untuk mendalami, menerapkan, dan bertanggungjawab atas tugasnya dalam hal pelaporan kegiatan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.

### KEGIATAN KETIGA

Pelaksanaan aktualisasi pada minggu ketiga dan ke empat bulan September 2019 adalah melakukan penyusunan *table of content* laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dari Masa Sidang I hingga Masa Sidang V Tahun Anggaran 2018 – 2019 dan pengunggahan nya kedalam sistem *cloud* DPR RI. Pada tahap yang dilakukan mulai tanggal 17 – 24 September 2019 ini, peserta merangkum data laporan singkat rapat yang telah melalui proses inventarisasi yang disusun berdasarkan tanggal pelaksanaan audiensi. Lebih lanjut, untuk memudahkan proses pencarian data, peserta memutuskan untuk membuat *file table of content* yang dibagi berdasarkan masa sidang, dimana hal ini juga dapat memudahkan rekan kerja yang akan menggunakan produk aktualisasi ini dalam penyusunan laporan kinerja.



Gambar 6. Peserta melakukan input data laporan singkat kedalam *table of content*



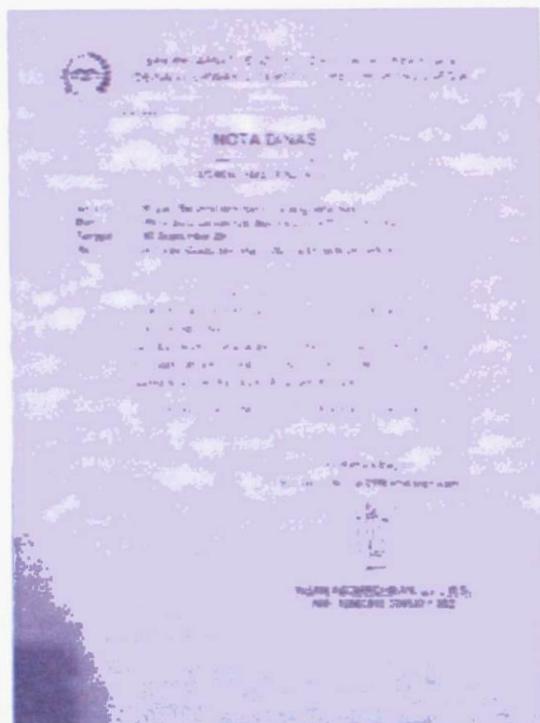
Gambar 7. Screenshot contoh laporan singkat yang di input kedalam *table of content*.

Tahapan berikutnya adalah tahap pengunggahan *table of content* yang telah terbentuk, kedalam sistem *cloud* DPR RI yang beralamat di sekretariat\_korpolkam@dpr.go.id. Untuk memperlancar proses ini, sebelumnya pada tanggal 10 September 2019 peserta telah melakukan koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI dalam hal aktivasi sistem *cloud* di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Koordinasi ini diawali dengan melakukan rapat dengan Pranata Komputer dari Bidang Data dan Teknologi Informasi di Ruang Rapat Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI.



Gambar 8. Rapat Koordinasi dengan BDTI





Gambar 10. Nota Dinas untuk mengaktifasi *cloud* Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam

Setelah proses aktivasi sistem *cloud* dan proses penyusunan *table of content* selesai dilakukan, pada tanggal 26 September 2019 peserta melakukan pengunggahan terhadap seluruh *table of content* laporan sidang yang telah selesai disusun kedalam *cloud* Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.



a) Whole of Government

Dalam rangka memudahkan peserta dalam mengunggah data laporan singkat yang telah dirangkum dalam bentuk *table of content* kedalam sistem *cloud* DPR RI, peserta melakukan **kerjasama** dengan Pranata Komputer Bidang Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya yang mungkin muncul dari pengerjaan aktualisasi ini.

b) Etika Publik

Untuk memastikan diterapkannya nilai etika publik pada kegiatan ini, peserta memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan serta pengunggahan *table of content* kedalam sistem *cloud* dilakukan dengan **cermat dan penuh tanggung jawab** sehingga tidak ada kegiatan yang luput dan tidak terdata kedalam *output* aktualisasi peserta.

c) Komitmen Mutu

Penyusunan *table of content* dilakukan dengan prinsip yang **berorientasi pada mutu**, dimana peserta melakukan *input* data laporan singkat dengan cermat dan teliti, sehingga *output* aktualisasi peserta dapat berguna bagi kelancaran penyusunan laporan kinerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.

Selain nilai – nilai dasar ASN, peserta juga menerapkan beberapa nilai organisasi RAPI (Religius, Akuntabilitas, Profesional, Integritas) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada tahap ini, diantaranya adalah :

a) Akuntabilitas

Proses penyusunan *table of content* dan pengunggahannya kedalam sistem *cloud* DPR RI dilakukan dengan mengedepankan

nilai **jujur dan partisipatif** peserta, dimana peserta melakukan kerjasama yang baik dan terbuka dengan pihak BDTI sehingga kegiatan ketiga ini dapat diselesaikan dengan baik.

b) Integritas

Untuk memastikan nilai integritas hadir pada tiap kegiatan pelaksanaan aktualisasi, peserta memastikan untuk **mengikuti kode etik profesi dan perusahaan/lembaga** dalam proses penyusunan *table of content* dan dalam hal melakukan kerjasama dengan Pranata Komputer Bidang Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga.

#### **KEGIATAN KEEMPAT**

Pada minggu awal bulan Oktober 2019, peserta melaksanakan tahapan terakhir dari rangkaian pelaksanaan aktualisasi. Pada tahap ini, peserta melakukan penyerahan hasil penyusunan *table of content* kepada PLT Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam. Pada proses ini, peserta memberikan penjelasan terkait *output* aktualisasi peserta, dan memperlihatkan hasil *table of content* yang sudah terunggah dalam bentuk *shared file* dan dapat diakses pada sistem *cloud* di alamat [sekretariat\\_korpolkam@dpr.go.id](mailto:sekretariat_korpolkam@dpr.go.id) dan bagaimana produk aktualisasi ini dapat membantu rekan kerja di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam tahap penyusunan laporan kegiatan dan kinerja yang wajib dikumpulkan pada Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI pada tiap akhir masa sidang.

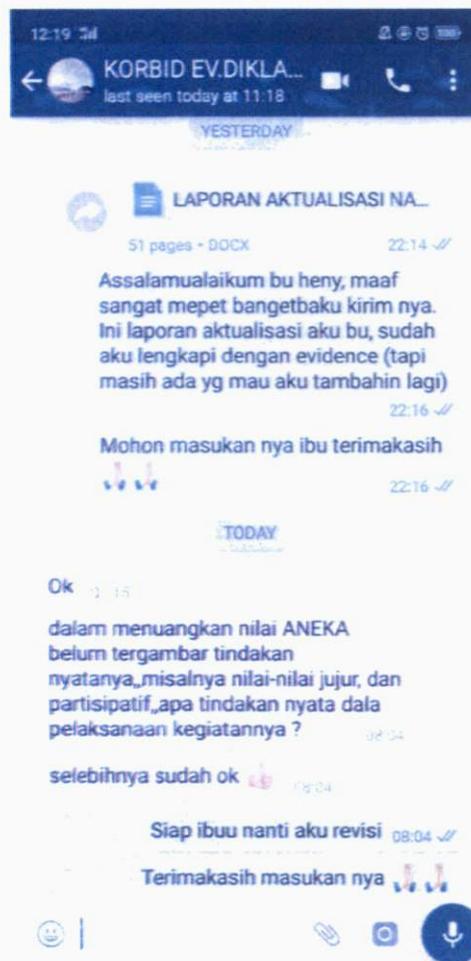
Untuk kelancaran proses penyampaian pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, peserta membuat undangan pelaksanaan sosialisasi yang diberikan kepada seluruh rekan kerja di





Gambar 14. Sosialisasi *output* aktualisasi peserta CPNS 2019 dengan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan peserta adalah melakukan penyampaian, atau proses bimbingan dengan *coach* terkait seluruh proses pelaksanaan aktualisasi. Pada tahap ini, peserta mengirimkan laporan kepada Kepala Bidang Evaluasi Bidang sebagai *coach* untuk mendapatkan masukan, dalam rangka penyempurnaan laporan akhir aktualisasi peserta CPNS DPR RI Angkatan III Tahun 2019.



Gambar 15. Konsultasi/Coaching dengan Kepala Bidang Evaluasi Diklat sebagai *coach*

Setelah seluruh proses *coaching* dan *mentoring* selesai dilakukan, peserta melakukan revisi terhadap beberapa catatan-catatan yang diberikan *coach/mentor* untuk penyempurnaan laporan akhir aktualisasi peserta CPNS Angkatan III Tahun 2019.

Pada kegiatan terakhir rangkaian pelaksanaan aktualisasi, yakni Penyampaian Laporan Hasil Akhir Aktualisasi, peserta menerapkan beberapa nilai dasar ASN sebagai berikut :

a) Akuntabilitas

Pada tahap ini, nilai akuntabilitas seorang ASN diterapkan peserta dengan mengedepankan sikap **transparan dan partisipatif** dalam menyampaikan laporan hasil akhir

aktualisasi baik kepada Kepala Sub Bagian Kerumahtangaan dan TU Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sebagai atasan langsung dan mentor peserta, serta kepada Kepala Bidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat sebagai *coach*.

b) Nasionalisme

Nilai nasionalisme pada tahapan ini diterapkan peserta dengan mengedepankan rasa **hormat dan tidak memaksakan kehendak** ketika mendapatkan masukan baik dari mentor, atasan langsung, *coach*, maupun rekan kerja sehingga implementasi aktualisasi peserta dapat memberikan manfaat yang berguna bagi **kepentingan bersama**.

c) Etika Publik

Pada proses penyampaian laporan hasil aktualisasi kepada mentor, *coach*, serta rekan kerja di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam peserta mengedepankan sikap **sopan, dan saling menghormati** opini serta masukan yang diberikan.

d) Komitmen Mutu

Dalam rangka penyempurnaan laporan pelaksanaan aktualisasi sebagai salah satu syarat kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, peserta menerapkan sikap **kreatif dan berorientasi mutu** dalam tahap penyampaian laporan kepada *stakeholders* yang berperan pada penyusunan dan implementasi aktualisasi peserta.

Lebih lanjut, peserta juga menerapkan nilai – nilai dasar organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada tahap akhir implementasi aktualisasi ini, yakni :

a) Akuntabilitas

Sikap *accountable* yang merupakan salah satu nilai dasar organisasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI diperlihatkan peserta dengan selalu mengedepankan **transparansi** dan penuh **keadilan** atau tidak memihak pada seluruh proses penyusunan laporan dan pelaksanaan aktualisasi peserta.

b) Profesional

Sikap professional dilakukan peserta dengan memastikan *output* aktualisasi yang dilakukan peserta dapat **memperlihatkan keandalan** peserta dalam hal pelaksanaan tugas sehingga seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat dan cermat. Selain itu, sikap professional juga ditunjukkan peserta dengan **menghormati segala masukan** yang diberikan mentor serta *coach*, mengingat seluruh masukan yang diberikan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan dan *output* aktualisasi peserta.

c) Integritas

Nilai integritas yang diperlihatkan peserta tahap ini diperlihatkan dengan **komitmen peserta untuk terus berbuat yang terbaik**, pada level yang lebih tinggi, yakni dengan menyampaikan hasil laporan akhir kepada *stakeholders* terkait dan menerima seluruh masukan untuk penyempurnaan laporan aktualisasi peserta.

## B. STAKEHOLDERS

Dalam rangka menyukseskan rencana aktualisasi peserta, terdapat beberapa *stakeholders* yang berperan dalam upaya implementasi aktualisasi ini, yakni :

No.	Stakeholders	Peran
1.	PLT Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	Koordinasi dan konsultasi terkait implementasi rancangan aktualisasi.
2.	Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	Koordinasi dan konsultasi terkait implementasi rancangan aktualisasi.
3.	Pengadministrasi Umum TU Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam	Pelaksana administrasi tata persuratan
4.	Bagian Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	Pihak yang berperan dalam melakukan aktivasi <i>cloud</i> Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.
5.	Kepala Bidang Evaluasi Diklat	Sebagai <i>coach</i> penyusunan laporan aktualisasi peserta CPNS.
6.	Rekan Kerja di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	<i>Potential user</i> produk aktualisasi peserta

### C. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

Dalam mengimplementasikan program aktualisasi ini, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi peserta di antara lain :

1. Volume laporan singkat yang tinggi dan waktu pengerjaan yang terbatas
2. Tingginya volume pekerjaan di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.
3. Masih banyaknya arsip laporan singkat yang tercecer, sehingga menyulitkan proses inventarisasi data laporan singkat.
4. Cloud Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang belum diaktifkan.

Menyikapi kondisi diatas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan peserta dalam mengatasi beberapa kendala diatas, diantaranya :

1. Manajemen waktu yang baik dalam mengumpulkan laporan singkat dan mengunggahnya kedalam system *cloud* untuk mengatasi kendala keterbatasan waktu;
2. Melakukan kerjasama dengan Pengadministrasi Umum serta Office Boy di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dalam melakukan pencarian arsip laporan singkat yang tercecer untuk memudahkan proses inventarisasi data dan penyusunan laporan singkat kedalam bentuk *table of content* yang selanjutnya akan diunggah dalam sistem *cloud* DPR RI.
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Data dan Teknologi Informasi (BDTI) DPR RI dengan memberikan nota dinas kepada BDTI untuk segera melakukan aktivasi terhadap *cloud* email Sekretariat\_Korpolkam@dpr.go.id

## D. ANALISIS DAMPAK

### 1. HASIL INISIATIF

Dampak positif yang dihasilkan apabila rancangan aktualisasi ini dilaksanakan antara lain :

#### INTERN

- Terdapat pendataan laporan singkat yang terstruktur dan rapi berdasarkan masa sidang di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
- Mengintegrasikan data laporan singkat yang dapat diubah (jika terjadi sebuah kesalahan) dan di akses oleh seluruh pegawai di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.
- Memperingkat tahapan dan mempercepat proses penyusunan laporan kinerja dengan optimalisasi data *table of content* laporan singkat yang tersedia di *cloud* Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

#### EKSTERNAL

- Memperkaya produk kinerja DPR RI dalam bentuk "*table of content*" yang dapat turut di *upload* pada sistem PPID tiap akhir masa sidang.

### 2. TIDAK DILAKSANAKANNYA NILAI DASAR ANEKA

Terdapat beberapa dampak yang mungkin terjadi apabila nilai – nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) tidak diterapkan pada proses pelaksanaan aktualisasi ini. Diantaranya adalah :

### AKUNTABILITAS

Apabila nilai akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik, maka yang mungkin terjadi adalah tidak adanya kejelasan target, kurangnya transparansi dan konsistensi dalam pendataan laporan singkat. Hal ini dapat berdampak pada laporan singkat yang tidak tertata dengan baik dan sulit dicari ketika dibutuhkan pada saat penyusunan laporan kinerja.

### NASIONALISME

Nilai-nilai nasionalisme sangat penting untuk diaplikasikan selama proses implementasi aktualisasi. Apabila nilai-nilai ini tidak diterapkan, maka yang mungkin terjadi adalah adanya *conflict of interest* karena adanya *resistance* dari salah satu pihak dalam menerima masukan.

### ETIKA PUBLIK

Tanpa adanya implementasi etika publik yang baik, maka bukan tidak mungkin terjadi konflik yang dikarenakan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akibat perilaku salah satu pihak yang dinilai kurang sopan atau hormat.

### KOMITMEN MUTU

Apabila nilai-nilai komitmen mutu tidak dilaksanakan dengan baik, maka program aktualisasi yang dilakukan berpotensi untuk tidak mencerminkan adanya hasil implementasi aktualisasi yang berorientasi mutu dan melalui proses inovasi.

## ANTI KORUPSI

Nilai anti korupsi pada rencana aktualisasi ini dicerminkan dari sikap jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Tanpa adanya implementasi dari nilai-nilai diatas maka bukan nya tidak mungkin potensi terjadinya proses pelaporan yang tidak transparan dan mengandung kepentingan pihak tertentu sehingga menghambat kinerja Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam .

## E. JADWAL KEGIATAN

TABEL 3. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI CPNS

	KEGIATAN	AGUSTUS 2019	SEPTEMBER 2019				OKTOBER 2019	Checklist
		MINGGU	MINGGU				MINGGU	
		5	1	2	3	4	1	
1.	Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan mentor terkait implementasi rencana aktualisasi							
	a. Penyampaian konsep pelaksanaan aktualisasi kepada PLT Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam							
	b. Meminta persetujuan konsep dan urutan pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada atasan.							
2.	Menginventarisasi data laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam							
	a. Mengumpulkan laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dari masa sidang I – V Tahun Sidang 2018 – 2019							
	b. Mengurutkan laporan singkat dari masa sidang I untuk mempermudah proses penyusunan table of content							
3.	Penyusunan <i>Table of Content</i> laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam kedalam <i>system cloud</i>							
	a. Merangkum data laporan singkat rapat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk Masa Sidang I – V Tahun Sidang 2018 – 2019 kedalam table of content							

	b. Mengunggah Table of Content yang sudah tersusun rapi dalam bentuk shared file kedalam cloud sekretariat_korpolkam@dpr.go.id							
4.	Penyampaian Laporan Hasil Akhir Aktualisasi							
	a. Penyerahan hasil penyusunan table of content kepada mentor							
	b. Penyampaian hasil aktualisasi kepada coach							

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Aktualisasi yang dilaksanakan penulis dengan judul "***Pemanfaatan Cloud Untuk Pendataan Laporan Singkat Pada Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam***" dilaksanakan selama 30 hari pembelajaran di tempat kerja, atau habituasi yang sebelumnya telah didahului dengan materi klasikal yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus 2019 di Kopo, Jawa Barat. Project aktualisasi yang dilakukan peserta, bertujuan untuk memudahkan proses pencarian laporan singkat, sekaligus memudahkan proses penyusunan laporan kinerja yang harus disusun setiap akhir masa sidang DPR RI. Aktualisasi ini terdiri dari 4 kegiatan utama, diantaranya adalah melaksanakan rapat dan koordinasi dengan atasan langsung dan mentor, melakukan inventarisasi data laporan singkat, penyusunan *table of content* kedalam sistem *cloud* Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, dan proses penyampaian laporan hasil akhir aktualisasi.

Dalam rangka menyempurnakan aktualisasi tersebut, peserta melakukan pemilihan isu prioritas dengan melakukan analisa melalui penggunaan Teknik USG, dimana dari hasil analisis tersebut dapat terlihat bahwa banyaknya arsip laporan singkat yang tercecer, telah berimbas negatif pada kelancaran penyusunan laporan kinerja bagian, yang harus dikumpulkan setiap akhir masa sidang.

Untuk itu, dalam rangka menyederhanakan proses pencarian data laporan singkat dan membuat laporan tersebut *available* atau tersedia di berbagai tempat dan kondisi, peserta merangkum data – data laporan singkat tersebut kedalam bentuk *table of content* yang terupload sebagai sharing files pada sistem *cloud* DPR RI yang beralamat di sekretariat\_korpolkam@dpr.go.id

Melalui proses digitalisasi data laporan singkat yang dilakukan peserta melalui pengunggahan data *table of content* kedalam sistem *cloud* DPR RI dalam bentuk *sharing files*, hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kelancaran kinerja Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

Dengan terlaksananya pemanfaatan platform *cloud* dalam penyimpanan data laporan singkat, diharapkan dapat berlanjut dan diterapkan oleh seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI

## **B. SARAN**

Dalam upaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas pelaporan di Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, agar kedepannya tiap laporan singkat terus di *update* secara berkala kedalam *table of content* yang dibentuk per masa sidang. Dengan melakukan hal tersebut, bukan hanya bermanfaat dalam peningkatan aksesibilitas data laporan singkat dimana dan kapan saja, karena telah ter integrasi dalam sistem *cloud*, namun pada waktu yang bersamaan juga mempermudah dan mempersingkat tahapan kerja pegawai, yang bertugas dalam menyusun laporan kinerja.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan manfaat dari *table of content* data laporan singkat yang telah diunggah kedalam sistem *cloud ini*, sebaiknya ada penambahan jenis laporan yang dimasukkan. Sebagai contoh, mengingat sampai saat ini laporan singkat yang dimasukkan kedalam tabel masih berupa laporan rapat audiensi maupun rapat internal yang berlangsung di DPR, kedepannya untuk dapat dikembangkan pada jenis – jenis rapat lainnya, seperti laporan kunjungan kerja domestik dan luar negeri, hingga jenis – jenis rapat lainnya yang berlangsung dilingkungan DPR RI.

**LAPORAN HASIL KONSULTASI**  
**KONSEP KEGIATAN AKTUALISASI CPNS ANGKATAN III 2019**  
**SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM**

---

Hari, Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019  
Pukul : 09.30 WIB  
Tempat : Ruang Kasubag TU & Runga Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

**Calon Pegawai Negeri Sipil**

Nama : Nanda Ainun Octafiani, S.E  
NIP : 19931009 201903 2 001  
Jabatan : Penyusun Bahan Kebijakan  
Gol. : III/a

**Mentor**

Nama : Insan Abdirrohman, S.H., M.Si  
NIP : 19800919 200502 1 002  
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam  
Gol. : III/d

**Hasil Konsultasi/Bimbingan :**

1. Melakukan koordinasi dan Pengadministrasian Umum Bag. Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam terkait pengumpulan arsip fisik laporan singkat rapat.
2. Segera melakukan Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) Setjen dan BK DPR RI untuk melakukan aktivasi *cloud* dengan alamat yang sama dengan e-mail bagian di sekretariat\_korpolkam@dpr.go.id
3. *Table of content* laporan singkat untuk dibuat per masa sidang sehingga memudahkan pencarian data.

**Mengetahui,**

Mentor



( Insan Abdirrohman, S.H., M.Si )

NIP. 19800919 200502 1 002





T.T

a

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

**NOTA DINAS**

-----  
NOMOR: 1082/SP.02/09/2019

Kepada : Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi  
Dari : Plt Kepala Bagian Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam  
Tanggal : 10 September 2019  
Hal : Aktivasi *Cloud* Sekretariat Watua Korpolkam DPR RI

Dengan ini kami menginformasikan bahwa Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam membutuhkan aktivasi *cloud* untuk mendukung kelancaran aktifitas unit kerja. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan bantuan Saudara sekiranya dapat menugaskan teknisi/*helpdesk* untuk keperluan aktivasi *cloud* Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih

Plt Kepala Bagian  
Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

INSAN ABDIRROHMAN, S.H., M.Si.  
NIP. 19800919 200502 1 002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor : 17 /SP.02/10/2019  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Hal : Undangan

7 Oktober 2019

Yth.

1. Kasubag Rumga ;
2. Staff Bagian TU dan Rumga;

Di Lingkungan Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada :

Hari : Selasa, 8 Oktober 2019  
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Kasubag TU Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam  
Acara : Sosialisasi *output* aktualisasi CPNS atas nama Nanda Ainun Octafiani tentang Pemanfaatan Cloud Untuk Pendataan Laporan Singkat Pada Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara rapat koordinasi mengenai rancangan aktualisasi dari CPNS tersebut. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Bagian  
Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

  
**INSAN ABDIRROHMAN, S.H., M.Si.**  
NIP. 19800919 200502 1 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR HADIR  
SOSIALISASI OUTPUT AKTUALISASI CPNS  
SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPR-RI/KORPOLKAM  
HARI : SELASA, 8 OKTOBER 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Insan Abdirrohman, S.H., M.Si	Pt. Kepala Bagian	
2.	Turi Handayani, S.Sos	Kasubag Rumah Tangga	
3.	Drs. Rahmat Setiadi	Penyusun Bahan Kebijakan	
4.	Sri Hartati Agustin	Pengolah Data	
5.	Iman Wahyudin, S.AP	Pengolah Data	
6.	Samanhudi	Pengadministrasi Umum	
7.	Ari Sobari	PPNPN	
8.	Ahmed Tamami		
9.	Bu X		
10.	Nandu Amin Octofiani	Penyusun Bahan Kebijakan	
11.			

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG I TAHUN 2018 - 2019**

No	MASA SIDANG	TANGGAL	RAPAT & AUDIENSI	RINGKASAN & PUTUSAN	STATUS	PIC	KET
1	I	28 AUG 2018	MENERIMA AUDIENSI IBU NENO WARISMAN DAN KAWAN- KAWAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Di Pekanbaru, tanggal 25 Agustus 2018 di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru dan berujung pada pemulangan paksa saya, Neno Warisman oleh aparat keamanan dan perlakuan kasar dan penangkapan pada saat akan menghadiri undangan kegiatan penyampaian aspirasi tanggal 26 Agustus 2018 serta dalam rangka memenuhi undangan dari Dr. Diana Tabrani dan Ustadz Abdul Somad.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan hal ini merupakan pembatasan dalam demokrasi yang sangat merugikan masyarakat dalam beraspirasi maupun menentukan haknya.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan akan melakukan RDP dengan memanggil pihak KAPOLRI dan BIN.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta kepada Ibu Neno Warisman dan Kawan-kawan untuk mengumpulkan bukti yang telah terjadi</li> </ul>	0	-	

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

2	I	10 SEP 2018	MENERIMA AUDIENSI DARI MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH KABUPATEN BOGOR	<p>untuk dapat dilanjutkan kepada pihak terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Keterlambatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bogor.</li><li>- Pemerintah kurang memperhatikan sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri yang membuat kurangnya kesejahteraan para guru disekolah swasta.</li><li>- Didalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk kepastian menjadi PNS.</li><li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta paper/surat untuk diteruskan kepada Komisi terkait.</li><li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan persoalan PNS sudah sering dibahas oleh Komisi X dengan Mitra terkait tetapi terbentur oleh anggaran, aspirasi baik ini akan tetap diperjuangkan untuk bisa mensejahterakan para guru honorer.</li></ul>
---	---	-------------	--	--

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

3	I	10 SEP 2019	MENERIMA KUNJUNGAN SISWA MAN 2 BOGOR SEBANYAK 355 ORANG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa dan Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bogor ingin mengetahui figur dari Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.</li> <li>- Siswa dan Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bogor meminta untuk dijelaskan terkait kinerja DPR RI.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan tugas dan wewenang DPR RI sangatlah luas yang diantaranya menyusun PROLEGNAS, Rancangan UU, memberikan persetujuan Anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang - Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah.</li> </ul>	O	-
4	I	24 SEP 2019	MENERIMA AUDIENSI FRONT PEMBELA LANCANG KUNING RIAU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegasi menyampaikan bahwa Kapolda Riau, Kapolresta Pekanbaru melakukan pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara, karena tidak memberi izin/ tidak menyetujui/ melarang dilakukannya Acara Deklarasi #2019 Ganti Presiden pada tanggal 26 Agustus 2018. Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD tahun 1945) menyebutkan "Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,</li> </ul>	O	-

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

- Delegasi menyampaikan bahwa Tindakan Kapolda Riau, Kapolresta Pekanbaru beserta aparat kepolisian serta Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Riau yang telah melakukan tindak kekerasan, penyanderaan selama 6,5 jam terhadap Hj. Neno Warisman, Ustaz Syamsul, Dr. Hj. Diana Tabrani, Syaid Lukman dan Sdr. Arief, di dalam sedan BMW Putih, No. Pol : D 1352 AFK didekat pintu gerbang Bandara SSK II dan di dalam kawasan Bandara SSK II Pekanbaru, dan juga pemulangan paksa terhadap Hj. Neno Warisman dan ustaz Syamsul, merupakan juga pelanggaran/perlawanan terhadap kewajiban dan tanggung jawab konstitusional Negara terutama pemerintah seperti yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 pasal 28 J ayat (4).
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa ancaman fisik, membakar mobil dan pembunuhan ini merupakan ancaman biadab yang dilakukan kepada oknum-oknum setempat.

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG I TAHUN 2018 - 2019**

5	I	25 SEP 2018	<p style="text-align: center;">MENERIMA AUDIENSI TIM ADVOKASI GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA (GNPF) ULAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan meneruskan kepada Komisi I dan Komisi III untuk segera ditindaklanjuti kasus prekusinya.</li> <li>- Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menyampaikan Berdasarkan informasi yang kami peroleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Habib Rizieq Syihab mengalami perlakuan diskriminatif dan intimidatif yang mengancam pada keamanan, kenyamanan dan keselamatan diri Habib Rizieq Syihab sebagaimana uraian sebagai berikut :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.1. Bahwa pada sekira bulan Mei dan Juli tahun 2018 Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus dugaan penghinaan Pancasila dan kasus dugaan Pornografi, terhadap Habib Rizieq Syihab, yang mana atas terbitnya SP3 tersebut, Habib Rizieq Syihab kemudian mengumumkannya kepada publik;</li> <li>- 3.2. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018, bapak Prabowo Subianto, Bapak Amien Rais, dan beberapa tokoh</li> </ul> </li> </ul>
---	---	-------------	--	--

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

politik mengunjungi Habib Rizieq Syihab di kediamannya di Arab Saudi;

- 3.3. Bahwa sejak diumumkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dan pertemuan Habib Rizieq Syihab dengan Bapak Prabowo Subianto, Bapak Amien Rais dan beberapa tokoh politik tersebut diatas, mulai terjadi perlakuan diskriminatif dan intimidatif terhadap Habib Rizieq Syihab diantaranya tindakan pencegahan Habib Rizieq Syihab Habib Rizieq Syihab ke luar negara Arab Saudi ('pencengkalan') dan tindakan pembatasan atas kemerdekaan bergerak Habib Rizieq Syihab selama di Arab Saudi, dimana setiap gerakan kaki Habib Rizieq Syihab selalu diikuti dan diawasi. Selain itu, Habib Rizieq Syihab diinterogasi secara sewenang-wenang.
- 3.4. Bahwa tindakan pencengkalan terjadi ketika Habib Rizieq Syihab hendak pergi ke Malaysia dari Arab Saudi untuk bertemu dengan Promotor Doktoral guna menyelesaikan Disertasinya, dimana Petugas imigrasi Arab Saudi pada saat

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG I TAHUN 2018 - 2019**

- itu melarang Habib Rizieq Syihab pergi ke Malaysia tanpa alasan yang jelas;
- 3.5. Bahwa Habib Rizieq Syihab kemudian mempertanyakan kepada Pejabat Pemerintah Arab Saudi atas terjadinya pencengkalan tersebut dimana setelah memeriksa Habib Rizieq Syihab, Pejabat-pejabat tersebut juga secara jelas menyatakan bahwa Habib Rizieq Syihab tidak melakukan pelanggaran hukum;
  - Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa telah diterima bukti-bukti visual dan audio dari Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama untuk diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
  - Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa adanya unsur dalam negeri yang menyebabkan tertahannya Habib Rizieq Syihab akan diselidiki secara cermat kembali oleh DPR RI apabila benar ini merupakan pelanggaran hak konsukensi Warga Negara Indonesia.

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

6	I	27 SEP 2018	MENERIMA AUDIENSI ULAMA SE-PRIANGAN TIMUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ulama Se-Priangan Timur menyampaikan dalam sektor pendidikan pesantren masih belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah.</li> <li>- Ulama Se-Priangan Timur memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa mempertegas pemerintah dalam sektor pendidikan pesantren.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa untuk meningkatkan standarisasi bidang pendidikan, pengajaran maupun pembelajaran supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan dalam hal ini akan mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya bisa menjadi perhatian pemerintah, pesantren merupakan penghasil bibit pendakwah yang bisa menjadi inspirasi masyarakat muslim.</li> </ul>
7	I	27 SEP 2018	MENERIMA AUDIENSI RELAWAN WARGA NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relawan Warga Nasional memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam agar menyampaikan kepada pemerintah untuk</li> </ul>

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

mengembalikan asset Indosat yang dijual ke asing.

- Relawan Warga Nasional melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ingin menagih janji kepada Presiden Republik Indonesia tentang janjinya pengembalian asset Indosat.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan dalam hal ini Presiden pada kampanye tahun 2014 berjanji akan mengembalikan asset Indosat tetapi bukti tersebut belum menemui hasilnya.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa aspirasi pengaduan ini akan ditindaklanjuti kepada pihak terkait.
- Gerakan Rakyat Menentang World Bank – IMF bahwa kegiatan World Bank IMF ini memperburuk kehidupan rakyat untuk mendapatkan kepastian tanah, rumah kerja karena investor asing di Indonesia serta tidak memberikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- Gerakan Rakyat Menentang World Bank – IMF di Bali memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk

8

I

27 SEP 2018

MENERIMA AUDIENSI GERAKAN  
RAKYAT MENENTANG WORLD  
BANK – IMF DI BALI.

O

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

9	I	4 OCT 2018	MENERIMA AUDIENSI IKATAN SENAT MAHASISWA EKONOMI INDONESIA (ISMEI).	<p>menyampaikan penghentian pemakaian APBN Negara Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan dalam kegiatan IMF-World Bank ini sangat merugikan negara diantara negara yang sudah terkena dampaknya menjadi miskin dan membuat kaum Kapital menjadi kaya.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan bahwa pada pidato Presiden Tahun 2015 menyampaikan kritikan kepada IMF – World Bank pada saat konferensi Asia-Afrika.</li> <li>- Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) menyampaikan permohonan untuk menjadi pembicara dalam acara “Pembahasan Ekonomi Indonesia Pada Saat Ini” yang akan diselenggarakan pada bulan Desember.</li> <li>- Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk memberi masukan-masukan kepada mahasiswa ekonomi seluruh Indonesia tentang perkembangan ekonomi pada saat ini.</li> </ul>
---	---	------------	---	---

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

10    I    4 OCT 2018    MENERIMA AUDIENSI  
HIMPUNAN SENI BUDAYA ISLAM  
(HSBI).

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan dalam ISMEI ini banyak Politisi dan Tokoh-Tokoh yang turut mengikuti perkembangannya karena ini menjadi pusat central pembicaraan ekonomi yang ada di Indonesia.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa dari awal pemerintahan pada saat ini tidak adanya konsep perkembangan ekonomi Indonesia dengan seringnya impor bahan pokok, tingkat kemiskinan bertambah dan nilai rupiah melemah.
- Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) akan melantik Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam secepatnya apabila menyetujui menjadi Ketua Umum HSBI.
- Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) memohon untuk membangunkan atau membangkitkan kembali organisasi yang sudah mulai ditinggal oleh para anggotanya.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa menjadi Ketua Umum Himpunan Seni Budaya Islam

O

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

(HSBI) merupakan suatu kehormatan besar.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan dalam organisasi yang akan dibangun kembali merupakan suatu tantangan tersendiri dan menjadikan pembentukan karakteristik suatu organisasi yaitu Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI).
- Indonesia Strategic Institute (INSTRAT) menawarkan produk untuk meminimalkan tingkat kecurangan dalam Pemilu.
- Indonesia Strategic Institute (INSTRAT) memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa melanjutkan kepada pihak terkait untuk me-review produk INSTRAT ini.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan dalam sistem INSTRAT ini menjadi tolak ukur sebagai pemerintah untuk bisa mengakomodir tingkat kecurangan suara.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan bahwa pemerintah harusnya bisa menerima sistem ini yang sangat bisa membantu dalam

11 | 4 OCT 2019

MENERIMA AUDIENSI  
INDONESIA STRATEGIC  
INSTITUTE (INSTRAT).

0

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang I Tahun 2018 - 2019**

pelaksana Pemilu serta juga menjadikan Pemilu bersih dari tingkat kecurangan, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan mencoba untuk meneruskan kepada pihak terkait untuk  
- ber-audiensi tentang pengenalan sistem INSTRAT.

12	I	6 OCT 2018	MENERIMA AUDIENSI PERKUMPULAN DOKTER MUSLIM UNTUK PADI.	- Pertemuan tertutup.	0	-
13	I	6 OCT 2018	MENERIMA PERTEMUAN DENGAN IBU RATNA DKK.	- Pertemuan tertutup.	0	-

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG II TAHUN 2018 – 2019**

No	MASA SIDANG	TANGGAL	RAPAT & AUDIENSI	RINGKASAN & PUTUSAN	STATUS	PIC	KET
1	II	21 NOV 2018	MENERIMA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait acara yang bertemakan "Peran Mahasiswa Dalam Mengawal Pemilu 2019" Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo memohon kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk dapat hadir pada tanggal 26 November 2019.</li> <li>- Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo membutuhkan saran Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam terkait masalah menjelang Pemilu 2019.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa sudah seharusnya mahasiswa ikut ambil peran dalam Pemilu yang diselenggarakan baik melalui</li> </ul>	O	BW	

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

monitoring di KPU, atau langsung ke TPU.

- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa masih diperlukan nya transparansi sistem Pemilu dan peran Bawaslu serta KPU secara maksimal karena masih rawan nya tindak kecurangan pada perhitungan suara.
- Mahasiswa Pascasarjana IPB menyampaikan Riau merupakan daerah penghasil devisa perkebunan sawit yang sangat baik. Namun dengan adanya Perpres yang tidak membolehkan penambahan sawit kembali telah berpengaruh pada devisa negara.
- Mahasiswa Pascasarjana IPB menyampaikan Industry 4.0 yang

2 II 21 NOV 2018

MENERIMA MAHASISWA  
PASCASARJANA IPB

O BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

menitik beratkan kepada eksploitasi untuk kedepannya dan Mahasiswa Pascasarjana IPB memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk menjelaskan solusi kepada masyarakat untuk menghadapi tantangan industry di masa mendatang.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa sawit telah menyumbangkan devisa yang sangat besar. Namun yang dialami di lapangan, penjualan sawit dilakukan melalui pihak ketiga. Seperti halnya Singapura yang memiliki perusahaan sawit di Indonesia lalu mengirimkannya kembali ke Indonesia dalam bentuk ekspor sawit yang kemudian mengecilkan devisa negara. Untuk itu, bentuk perlindungan yang harus

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

dilakukan adalah Pemerintah untuk turun langsung mengawasi.

- Panitia Alumni 212 menyampaikan bahwa masih banyaknya upaya untuk menggagalkan acara Reuni 212
- Panitia Alumni 212 ingin mengadakan jamboree Alumni 212 pada tanggal 30 November 2018 di Bumi PERKEMAHAN Cibubur namun ada kendala seperti datangnya 5 (lima) Anggota BIN untuk membatalkan acara tersebut.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pelaksanaan Reuni 212 merupakan hak masyarakat dan dijamin oleh konstitusi yang tidak bisa diganggu gugat. Dengan adanya permasalahan tersebut serta masih adanya waktu,

3      II      22 NOV 2018      MENERIMA AUDIENSI PANITIA ALUMNI 212      O      BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

maka Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian RI dan BIN supaya acara tersebut bisa berjalan dengan baik.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pihaknya akan memenuhi undangan panitia, untuk menghadiri acara Reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2018.
- Duta Besar Denmark untuk Indonesia ingin mengetahui aktifitas serta program yang dilakukan Global Organization of Parleментарians Against Corruption (GOPAC)
- Duta Besar Denmark untuk Indonesia membicarakan kerjasama antara Denmark dan Indonesia

4 II 22 NOV 2018 MENERIMA DUTA BESAR DENMARK UNTUK INDONESIA

O BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

5	II	28 NOV 2018	RAPAT INTERN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN OTSUS ACEH, DIY, DAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan dalam mengembangkan kerja sama, Denmark mempunyai mesin tenaga angin yang sangat besar, dengan sistem kerja yang baik. Indonesia harusnya bisa bekerja sama dalam hal ini untuk mencegah polusi udara</li> <li>- Tenaga Ahli Tim Otsus Aceh, Papua, dan DIY menyampaikan laporan terkait temuan yang dihasilkan selama tugas yang diberikan oleh Pimpinan Tim Pemantau Pelaksanaan Otsus Aceh, Papua, dan DIY</li> <li>- Tenaga Ahli Tim Otsus Aceh, Papua, dan DIY menemukan beberapa fakta terkait tenaga kerja asli orang Papua dimana di beberapa daerah seperti Tolikara, PNS yang mengisi jabatan</li></ul>	O	BW
---	----	-------------	--	---	---	----

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

tersebut masih didominasi orang dari Toraja, Sulawesi Selatan.

- Ketua Tim Otsus Aceh, Papua, dan DIY mengusulkan Tim Tenaga Ahli Otsus Aceh, Papua, dan DIY membuat *fact finding* yang masih belum diselesaikan supaya Anggota Tim Otsus Aceh, Papua, dan DIY dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di Provinsi tersebut.
- Ketua Tim Otsus Aceh, Papua, dan DIY menyampaikan bahwa dari semua kesimpulan yang telah dibahas akan ada 3 (tiga) pembahasan, yaitu Laporan Tim Tenaga Ahli Otsus Aceh, Papua, dan DIY, Rencana Kunjungan Kerja ke Aceh, dan rencana rapat dengan kementerian terkait.

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

6

II

4 DES 2018

MENERIMA MAJELIS TAKLIM  
BINAUN MUKMINAT  
KABUPATEN BOGOR

- Majelis Taklim Binaun Mukminat Kabupaten Bogor memohon kejelasan penyelesaian guru honorer yang ingin diangkat menjadi PNS.
- Majelis Taklim Binaun Mukminat Kabupaten Bogor menentang dengan adanya LGBT yang sedang mempengaruhi kalangan masyarakat wilayah Bogor.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa permasalahan kontrak kerja yang tidak sesuai dengan yang berlaku oleh perusahaan atau pabrik bisa dilaporkan kepada instansi terkait atau KSPI agar bisa dibantu maupun ditindaklanjuti permasalahan tersebut.

O

BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan permasalahan LGBT ini yang meresahkan masyarakat harus bisa disikapi oleh pemerintah karena ini merupakan penyakit yang terus berkembang, seharusnya Pemerintah mengutuk keras tentang masalah tersebut. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menambahkan pada saat Rapat di Geneva – Swiss, Indonesia serta negara Timur Tengah menolak sikap negara barat yang menyetujui tentang keberadaan LGBT.

- Relawan Kasus Empat Anggota TNI AL yang Hilang dalam Tugas (Keluarga Laode) menyampaikan kasus hilangnya anggota TNI AL yang hingga saat ini belum ditemukan dan

7 II 5 DES 2018

MENERIMA RELAWAN KASUS  
EMPAT ANGGOTA TNI AL YANG  
HILANG DALAM TUGAS  
(KELUARGA LAODE)

O BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

Pemerintah memutuskan pemberhentian pencarian yang dianggap hilang dalam tugas.

- Relawan Kasus Empat Anggota TNI AL yang Hilang dalam Tugas (Keluarga Laode) memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk menyampaikan kepada Pemerintah untuk melanjutkan pencarian Anggota TNI AL tersebut, baik dalam keadaan hidup, mati, atau penyebab hilangnya mereka yang didukung bukti kasus kejadian, bukti ilmiah dan hukum.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan agar Relawan Kasus Empat Anggota TNI AL yang Hilang dalam Tugas (Keluarga Laode) membuat surat secara jelas dengan kejadian nyata yang dialami bukan

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

8	II	5 NOV 2018	MENERIMA DUTA BESAR VIETNAM UNTUK INDONESIA	<p>opini dan dengan dukungan bukti surat yang jelas, sehingga laporan tersebut dapat diteruskan kepada pihak terkait untuk bisa dilanjutkan pencariannya secara maksimal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, membicarakan hubungan bilateral antar kedua negara. Lebih lanjut, Duta Besar Vietnam menginginkan adanya pembentukan grup kerjasama bilateral antar Parlemen Indonesia dengan Vietnam.</li><li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan akan meneruskan permohonan Parlemen Vietnam untuk membentuk GKSb Vietnam dan Indonesia kepada Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024 karena ini bisa</li></ul>	O	BW
---	----	------------	--	---	---	----

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

9	II	5 DES 2018	<p style="text-align: center;">MENERIMA AUDIENSI H. ALDWIN RAHARDIAN M, S.H., M.AO., C.I.L., &amp; PARTNERS (PENGACARA AHMAD DHANI)</p>	<p>mempercepat dan memperkuat hubungan sesama parlemen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ahmad Dhani dipersekusi oleh sekelompok massa di Hotel Majapahit Surabaya, kemudian membuat <i>Vlog</i> di Instagram terkait persekusi yang dialaminya.</li><li>- H. Aldwin Rahardian M, S.H., M.AP., C.I.L &amp; Partners Pengacara Ahmad Dhani memohon kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk mengawasi dan meminta kejelasan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur.</li><li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa terkait audiensi dan surat yang diterima oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan dilanjutkan kepada pihak terkait dan</li></ul>	O	BW
---	----	------------	---	---	---	----

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

10	II	28 DES 2019	MENERIMA KETUA KOMISI PERTAHANAN DAN DELEGASI PARLEMEN KOREA SELATAN	<p>akan meneruskan H. Aldwin Rahardian M, S.H., M.AP., C.I.L &amp; Partners untuk beraudiensi dengan Komisi III DPR RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Komisi Pertahanan dan Delegasi Parlemen Korea Selatan menyampaikan tentang kerjasama yang sudah terbentuk dibidang Industri Pertahanan tetap menjadi sorotan utama.</li> <li>- Ketua Komisi Pertahanan dan Delegasi Parlemen Korea Selatan menyampaikan bahwa hubungan Indonesia – Korea Selatan masih bersinergi dalma bidang teknologi dan tenaga kerja.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu telah dilaksanakan</li> </ul>	O	BW
----	----	-------------	--	--	---	----

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang II Tahun 2018 – 2019**

Pertemuan Parlemne Negara – Negara MIKTA yang bertujuan untuk membuat sistem kerjasama antar Indonesia – Korea Selatan yang semakin kuat.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, melalui kerjasama tersebut dapat memberikan titik terang bagi Indonesia untuk mengembangkan kapasitas alat utama sistem senjata (alutsista) yang canggih, serta adanya transfer teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan. Sehingga nantinya ahli teknologi antara kedua negara bisa mewujudkan kemandirian pertahanan Indonesia.

TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang III Tahun 2018 – 2019

No	MASA SIDANG	TANGGAL	RAPAT & AUDIENSI	RINGKASAN & PUTUSAN	STATUS	PIC	KET
1	III	1 FEB 2018	MENERIMA AUDIENSI BUNI YANI DAN KUASA HUKUM BUNI YANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buni Yani dan Kuasa HUKum menyampaikan tuduhan pada kasus Buni Yani diperkarakan dengan Pasal 32 Ayat 1 tentang pengeditan video atau pasal <i>hacker</i> yang sering disebut, padahal Buni Yani tidak melakukan perubahan isi konteks video tersebut.</li> <li>- Buni Yani dan Kuasa Hukum menyampaikan bahwa pengajuan banding sudah dilakukan, tetapi ditolak dan yang terakhir dilakukan adalah Kasasi. Kutipan Pengadilan Kasasi "Ditolak Kasasi baik Kejaksaan maupun Penasehat Hukum Buni Yani dan membayar denda perkara sebesar Rp. 2.500,-" putusan yang diberikan ini merupakan putusan</li> </ul>	O	BW	

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang III Tahun 2018 – 2019**

yang tidak lazim, karena itu pihak Buni Yani memohon arahan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa membantu kasus tersebut.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa kita sebagai Warga Negara Indonesia yang taat hukum dan akan mencoba meneruskan aspirasi ini kepada pihak terkait, serta Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dan Korkesra menyampaikan kesabaran yang mendalam tentang kasus penahanan Buni Yani yang terjadi saat ini didasarkan ketidakadilan hukum yang diterima.

2	III	4 FEB 2019	KUNJUNGAN SPESIFIK KE PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA	- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam didampingi Anggota Komisi III DPR RI H.R. Muhammad Syafi'i S.H., M.Hum	O	BW
---	-----	------------	--	---	---	----

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang III Tahun 2018 – 2019**

(A – 326) mengecek langsung prosedur penahanan yang diterima saudara Ahmad Dhani di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga ingin memastikan penahanan saudara Ahmad Dhani sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, dan Kunjungan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus menjalankan fungsi pengawasan serta *check and balance* sebuah Lembaga Hukum di Indonesia.
- Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua, dan DIY menyampaikan perubahan koordinator masing - masing Daerah Otsus dengan rincian sebagai berikut :

3

III

11 FEB 2019

RAPAT INTERN TIM PEMANTAU  
PELAKSANAAN OTSUS ACEH,  
PAPUA, DAN DIY

O

BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang III Tahun 2018 – 2019**

1. Koordinator Aceh yang semula  
H. Firmandez menjadi H.M. Nasir  
Djamil, S.Ag., M.Si
  2. Koordinator Papua yang semula  
Robert Rouw menjadi Willem  
Wandik S.Sos
  3. Koordinator Papua Barat Robert  
Jopy Kardinal
  4. Koordinator D.I.Y Bapak H.A.  
Hanafi Rais, S.IP., MPP
- Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan  
Otsus Aceh, Papua, dan DIY  
mengusulkan penambahan  
pengawasan Otsus untuk DKI Jakarta  
yang secepatnya dapat dibentuk  
sebelum akhir masa keanggotaan  
Tahun 2014 – 2019.
- Ikatan Lansia Bojong Kulur Kabupaten  
Bogor menyampaikan bahwa para

4 III 12 FEB 2019

AUDIENSI IKATAN LANSIA  
BOJONG KULUR KABUPATEN  
BOGOR

O BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG III TAHUN 2018 – 2019**

5	III	12 FEB 2019	AUDIENSI SMA NEGERI 1 BOJONG GEDE KABUPATEN BOGOR	<p>lansia Bojong Kulur ingin mendapat perhatian Pemerintah, seperti halnya Lansia di DKI Jakarta yang mendapat tunjangan setiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikatan Lansia Bojong Kulur Kabupaten Bogor menyampaikan masih mahlanya harga bahan pokok dan BBM saat ini, yang menyulitkan ibu rumah tangga dalam menjalakan aktifitas setiap harinya.</li> <li>- SMA Negeri 1 Bojong Kulur Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa generasi milenial menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan digital dan informasi pada zaman sekarang atau kedepan nya.</li> <li>- SMA Negeri 1 Bojong Kulur Kabupaten Bogor memohon saran Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam</li> </ul>	O	BW
---	-----	-------------	---	--	---	----

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang III Tahun 2018 – 2019**

6	III	13 FEB 2019	MENERIMA AUDIENSI SMK KESEHATAN AL – IKHLAS DAN SMK YMK MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR	terkait perkembangan kasus narkoba yang saat ini semakin marak.	O	BW
				<ul style="list-style-type: none"><li>- SMK Kesehatan Al – Ikhlas dan SMK YMK Megamendung Kabupaten Bogor meminta penjelasan terkait kiat sukses menjadi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.</li><li>- SMK Kesehatan Al – Ikhlas dan SMK YMK Megamendung Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa hukum di Indonesia masih banyak berpihak pada pemilik kekuasaan.</li><li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan masalah hukum yang ada di Indonesia dikarenakan kurang profesionalnya Lembaga – Lembaga hukum yang tidak <i>independent</i>. Eksekutor hukum seharusnya bisa melakukan tindakan hukum kepada</li></ul>		

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG III TAHUN 2018 – 2019**

siapapun tanpa melihat kekuasaan yang ada.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan manajemen waktu adalah salah satu kunci sukses dalam mencapai tujuan kita. Selain itu, hidup dalam berorganisasi juga sangat penting karena dapat membangun pertumbuhan karakter dan membentuk *passion* tiap individu.

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang IV Tahun 2018 - 2019**

No	MASA SIDANG	TANGGAL	RAPAT & AUDIENSI	RINGKASAN & PUTUSAN	STATUS	PIC	KET
1	IV	18 MAR 2019	AUDIENSI SIRAH & PARTNERS ADVOCATES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadu diminta mengirimkan surat kepada Watua DPR RI/Korpolkam</li> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam akan meneruskan aspirasi pada pihak terkait</li> </ul>	O	NA	
2	IV	18 MAR 2019	AUDIENSI FORUM KOMUNIKASI GTT – PTT K2 PGRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam mendorong GTT – PTT K2 PGRI dapat diangkat menjadi ASN disesuaikan dengan prosedur yang berlaku.</li> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam mendorong agar persoalan GTT – PTT K2 PGRI untuk segera diselesaikan.</li> </ul>	O	RT	
3	IV	18 MAR 2019	AUDIENSI MAJELIS PERJUANGAN RAKYAT SEMESTA (MPRS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam mendorong adanya audit forensic untu eprhitungan <i>real count</i></li> </ul>	O	RT	
4	IV	19 MAR 2019	AUDIENSI PERWAKILAN BURUH KAB BOGOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam menyarankan untuk diadakan sidak terkait masalah TKA yang disampaikan oleh delegasi buruh.</li> </ul>	O	RT	
5	IV	19 MAR 2019	AUDIENSI VIKING MANIA KAB. BOGOR DAN RX MANIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berharap komunitas tersebut dapat berkembang dan menjadi usaha yang dapat bermanfaat bagi anggotanya.</li> </ul>	O	BW	
6	IV	19 MAR 2019	AUDIENSI DENGAN GERAKAN BELA NEGARA (GBN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta pemerintah menindak tegas pengguna simbok yang dilarang negara</li> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam tidak menyetujui adanya E-KTP untuk WNA</li> </ul>	O	RT	

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang IV Tahun 2018 - 2019**

7	IV	25 MAR 2019	AUDIENSI MAJELIS TAKLIM RAUDHATUL JANNAH BOJONG KULUR, BOGOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam sepakat bahwa Majelis Taklim harus diberikan santunan dari Pemda.</li> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam menyetujui wacana penghapusan Ujian Nasional karena tidak ada standarisasi yang tepat.</li> </ul>	O	RT
8	IV	26 MAR 2019	AUDIENSI IKATAN GURU TK CILEUNGI BOGOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam meminta Ikatan Guru TK Cileungsi, Bogor untuk mengajukan surat terkait aspirasinya untuk disampaikan pada pemerintah</li> <li>- Akan menyampaikan terkait pembangunan RS rujukan untuk mempermudah pengurusan BPJS.</li> </ul>	O	RT
9	IV	28 MAR 2019	MENERIMA DELEGASI KETUA GKS NEW ZEALAND – SOUTH AND SOUTHEAST ASIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan keprihatinan terhadap insiden penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru</li> <li>- Watua DPR RI/Korpolkam menyambut baik rencana kedatangan delegasi parlemen Selandia Bar uke Indonesia</li> </ul>	O	NA
10	IV	5 APR 2019	AUDIENSI ULAMA BOGOR BARAT	Rapat Tertutup	O	NA
11	IV	9 APR 2019	AUDIENSI MAHASISWA UNIVERSITAS BAKRIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen sebagaimana diatur pada Undang-Undang MD3, DPR RI aktif dan <i>vocal</i> terhadap isu kemanusiaan yang terjadi pada muslim Rohingya dan Uighur di sejumlah forum internasional.</li> </ul>	O	NA

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang IV Tahun 2018 - 2019**

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan bahwa Terkait isu Rohingya, DPR RI telah melakukan intervensi untuk memasukan masalah krisis kemanusiaan etnis Rohingya, kedalam draft resolusi sidang Inter-Parliamentary Union yang diadakan di Saint Petersburg, Rusia beberapa waktu lalu.</li> </ul>		
12	IV	15 APR 2019	MENERIMA TOKOH MASYARAKAT RUMPIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Tertutup</li> </ul>	0	BW
13	IV	15 APR 2019	PELUNCURAN BUKU KATA FADLI : CATATAN – CATATAN KRITIS DARI SENAYAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan bahwa buku “Kata Fadli : Catatan -Catatan Kritis dari Senayan” merupakan kumpulan ucapan, <i>pers release</i>, serta berbagai macam peristiwa selama 4,5 tahun dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam</li> <li>- Buku ini berfokus pada substansi dan pokok pikiran yang terlontar dari Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, terlebih mengingat perannya sebagai anggota legislative yang berada di seberang pemerintahan (oposisi), sehingga dirinya merasa perlu lebih kritis dalam merespon masalah isu sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Indonesia selama periode 2014-2019</li> </ul>	0	NA
14	IV	16 APR 2019	PERTEMUAN DENGAN DIREKTUR KEMENTERIAN PDT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Tertutup</li> </ul>	0	NA

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang IV Tahun 2018 - 2019**

15	IV	22 APR 2019	AUDIENSI IBU YORA DAN TIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta Tim Sekber PADI Malaysia untuk membuat dokumen kronologis tertulis, tentang runtu kecurangan Pemilu 2019 yang terjadi di Malaysia</li> <li>- Meminta Tim Sekber PADI Malaysia untuk memasukan Salinan bukti dari lapangan baik dalam bentuk foto dan video kepada DPR dalam bentuk flash disc</li> <li>- Meminta Salinan laporan yang dibuat kepada Kepolisian Malaysia pada hari penangkapan pelaku Tindak Kecurangan Pemilu 2019.</li> </ul>	O	NA
16	IV	22 APR 2019	AUDIENSI KARTINI MILENIAL INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Tertutup</li> </ul>	O	NA
17	IV	29 APR 2019	AUDIENSI DELEGASI PENGUSAHA TURKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Tertutup</li> </ul>	O	NA
18	IV	29 APR 2019	AUDIENSI DENGAN IBU IBAH (KAKAK DARI HAMDIS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Tertutup</li> </ul>	O	NA
19	IV	29 APR 2019	AUDIENSI DENGAN DR. BAHTIAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Tertutup</li> </ul>	O	NA
20	V	8 MEI 2019	MENERIMA DELEGASI PERU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi Kunjungan Kerja Delegasi Peru yang dipimpin oleh H.E. Mr. Gilmer Trujillo Zagarra. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan Indonesia – Peru yang telah terbentuk sejak 1975.</li> </ul>	O	NA

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang IV Tahun 2018 - 2019**

21	V	8 MEI 2019	MENERIMA AUDIENSI PENGURUS GERAAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi peningkatan volume perdagangan bilateral Indonesia – Peru yang sebelumnya berjumlah 230 juta US Dollar di tahun 2017 menjadi 278,5 juta US Dollar di tahun 2018. Hal ini merupakan sinyal dan kesempatan yang baik bagi Indonesia dan Peru untuk meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengakui bahwa terdapat banyak masalah pada tahap sebelum dan sesudah penyelenggaraan Pemilu 2019 yang mengundang keprihatinan berbagai pihak</li> <li>- Terkait banyaknya kasus kecurangan dan tragedy meninggalnya 554 KPPS, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam merekomendasikan oembentukan Panitia Khusus atau Pansus Kecurangan Pemilu DPR RI</li> </ul>	O	NA
22	V	14 MEI 2019	MENERIMA AUDIENSI RELAWAN 02 UNTUK 574 KORBAN PEMILU 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasus meninggalnya 600 Petugas KPPS harus menjadi perhatian bersama. Namun demikian, patut disayangkan bahwa pemerintah belum serius dalam menyikapinya</li> <li>- Untuk memperbaiki sistem ini, DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019</li> </ul>	O	BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG V TAHUN 2018 - 2019**

No	MASA SIDANG	TANGGAL	RAPAT & AUDIENSI	RINGKASAN & PUTUSAN	STATUS	PIC	KET
1	V	8 MEI 2019	MENERIMA DELEGASI PERU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi Kunjungan Kerja Delegasi Peru yang dipimpin oleh H.E. Mr. Gilmer Trujillo Zegarra. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan Indonesia – Peru yang telah terbentuk sejak 1975.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi peningkatan volume perdagangan bilateral Indonesia – Peru yang sebelumnya berjumlah 230 juta US Dollar di tahun 2017 menjadi 278,5 juta US Dollar di tahun 2018. Hal ini merupakan sinyal dan kesempatan yang baik bagi Indonesia dan Peru untuk meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara</li> </ul>	O	NA	

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

2	V	8 MEI 2019	MENERIMA AUDIENSI PENGURUS GERAAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengakui bahwa terdapat banyak masalah pada tahap sebelum dan sesudah penyelenggaraan Pemilu 2019 yang mengundang keprihatinan berbagai pihak</li> <li>- Terkait banyaknya kasus kecurangan dan tragedy meninggalnya 554 KPPS, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam merekomendasikan oembentukan Panitia Khusus atau Pansus Kecurangan Pemilu DPR RI</li> </ul>	O	NA
3	V	14 MEI 2019	MENERIMA AUDIENSI RELAWAN 02 UNTUK 574 KORBAN PEMILU 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasus meninggalnya 600 Petugas KPPS harus menjadi perhatian bersama. Namun demikian, patut disayangkan bahwa pemerintah belum serius dalam menyikapinya</li> </ul>	O	BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

4	V	14 MEI 2019	MENERIMA AUDIENSI IKATAN KELUARGA BESAR UI (IKB UI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memperbaiki sistem ini, DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan investasi menyeluruh dan pembentukan TPF terkait meninggalnya 600 Petugas KPPS</li> <li>- Terkait pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2019 yang membutuhkan persetujuan mayoritas anggota dewan pada Sidang Paripurna, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan terus mendorong pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2019.</li> </ul>	O	NA
5	V	15 MEI 2019	MENERIMA RELAWAN SOLIDARITAS KORBAN PEMILU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relawan Solidaritas Korban Pemilu merupakan kumpulan individu yang prihatin dengan meninggalnya 600</li> </ul>		

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

orang Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

- Menyusul minimnya respon pemerintah atas musibah tersebut, Relawan Solidaritas Korban Pemilu meminta kepada DPR untuk membentuk Pansus Penyelenggaraan Pemilu yang diharapkan dapat menindaklanjuti peristiwa meninggalnya 600 orang Petugas KPPS pada penyelenggaraan Pemilu 2019.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menegaskan bahwa peristiwa meninggalnya 600 Petugas KPPS harus menjadi perhatian bersama, dan penyebab kematian harus dilakukan investigasi sehingga tidak

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

6	V	17 MEI 2019	MENERIMA AUDIENSI OIC YOUTH INDONESIA	<p>menimbulkan kegaduhan di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan bahwa DPR RI akan membentuk Panja/Pansus untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Namun, pembentukan Pansus akan lebih rumit karena keputusan pembentukannya harus melewati mekanisme Rapat Paripurna.</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengatakan bahwa DPR RI aktif dalam berbagai organisasi parlemen dan forum internasional</li> <li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyambut keinginan OIC Youth Indonesia yang ingin meningkatkan kerjasama antar Pemuda Indonesia</li> </ul>	O	NA
---	---	-------------	--	---	---	----

TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019

dan DPR RI sebagai Lembaga  
Legistatif negara

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan pihaknya mendukung peningkatan kerjasama Indonesia – Korea Selatan yang mencakup sektor Pertahanan, Perdagangan, dan Investasi yang sampai saat ini telah banyak menyerap tenaga kerja Indonesia.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mendorong segala bentuk kegiatan yang mempromosikan potensi Indonesia kepada Korea Selatan, khususnya dibidang investasi. Hal ini berdasarkan data BKPM RI bahwa telah terjadi peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia sebesar

7 V 17 MEI 2019

MENERIMA DELEGASI KOREAN  
ASEAN PARLIAMENTARY  
FORUM

O NA

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

				4,1% atau senilai 2,8 Milyar US Dollar dari tahun 2017 ke 2018.		
8	V	20 MEI 2019	MENYELENGGARAKAN LAUNCHING BUKU DAN BUKA PUASA BERSAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam peluncuran buku yang berjudul <i>"Strengthening the Indonesian Parliamentary Diplomacy: Selected Speeches by the Vice Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia"</i> Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan perhatiannya terhadap politik global, yang saat ini sedang diwarnai oleh gejala proteksionisme baik secara politik, maupun secara ekonomi.</li> <li>- Diplomasi Parlemen dapat membongkar kekakuan antar negara akibat tren proteksionisme. Pendekatan tradisional yang memandang diplomasi sebagai</li> </ul>	O	BW

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

domain eksekutif, jelas semakin tidak memadai. Terutama dalam merespon kebutuhan kerjasama internasional yang terus meningkat.

- Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra menyampaikan, Anggota DPR harus mulai menulis buku sebagai bentuk catatan sejarah selama menjadi anggota DPR sehingga masyarakat bisa melihat kinerjanya selama menjabat.
- Perwakilan Relawan Utusan Daerah yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Kota Sorong serta Provinsi Papua Barat mengutarakan sikap kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang

9 V 21 MEI 2019 AUDIENSI 50 ORANG RELAWAN  
UTUSAN DAERAH SE INDONESIA

O NA

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

menolak tegas seluruh hasil hitung dan keputusan KPU pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang dinilai cacat hukum.

- Menanggapi aspirasi Perwakilan Relawan Utusan Daerah, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaporkan berbagai indikasi kecurangan dan kegagalan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, seperti temuan 17,5 juta DPT bermasalah namun hingga saat ini belum mendapat penyelesaian atau respon yang memadai dari pemerintah.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan meneruskan aspirasi Perwakilan Relawan Utusan Daerah kepada Komisi II dan III DPR RI yang

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

10	V	27 MEI 2019	MENERIMA AUDIENSI TIM ADVOKASI KELUARGA KORBAN AKSI 21 – 22 MEI 2019	merupakan mitra kerja dari KPU, Bawaslu, dan Kepolisian RI.	O	NA
				- Tim Advokasi Keluarga Korban Aksi 21 – 22 Mei 2019 menjelaskan bahwa aksi damai pada 21 – 22 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta berjalan dengan kondusif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya video yang memperlihatkan pemuka agama dan pimpinan aksi yang membantu pihak kepolisian dalam membubarkan aksi secara tertib pada tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIB.		
				- Tim Advokasi Keluarga Korban Aksi 21 – 22 Mei 2019 mempertanyakan sikap aparat yang menggunakan media mercon, dalam upaya pembubaran massa aksi 21 – 22 Mei		

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG V TAHUN 2018 - 2019**

2019. Padahal, dalam SOP Pengendalian Massa oleh Polri, tidak ada aturan yang mengatur tentang penggunaan media mercon untuk mengendalikan massa yang tengah menyampaikan aspirasinya melalui aksi.

- Sampai hari Senin, 27 Mei 2019 Tim Advokasi dapat memastikan bahwa ada 10 orang meninggal dunia akibat Tragedi 21 – 22 Mei 2019 dimana 8 diantaranya sudah teridentifikasi dan dipertemukan dengan keluarganya.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya 10 korban paska kerusuhan 21 – 22 Mei 2019.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta Tim Advokasi Keluarga Korban Tragedi untuk memasukan

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

11	V	28 MEI 2019	MENERIMA HEAD OF MISSION REPUBLIC OF COSTA RICA	<p>surat pengantar, bukti foto dan video, serta aspirasinya yang ditujuk kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sehingga dapat diteruskan kepada Komisi III DPR RI sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bermitra dengan Kepolisian RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Head of Mission Republic of Costa Rica, Mr. Esteban Quiros menyampaikan bahwa Republik Costa Rica baru membuka Kedutaan Besar di Jakarta, pada akhir tahun 2017. Dengan dibukanya Kedutaan Besar di Indonesia, pihaknya berharap dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Costa Rica.</li> <li>- Head of Mission Republic of Costa Rica, Mr. Esteban Quiros menjelaskan</li> </ul>	0	NA
----	---	-------------	--	--	---	----



**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

isu pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu penting di negara Amerika Latin. Untuk itu pihaknya tertarik untuk bertukar informasi dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang juga menjabat sebagai Presiden Global Organization of Parleментарians Against Corruption (GOPAC).

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi pembukaan Kedutaan Besar Republik Costa Rica di Indonesia, dan berharap hal ini dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang.
- Delegasi Duta Amerika meminta masukan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam menyuarakan permasalahan HAM di Indonesia. Hal

12	V	17 JUN 2019	MENERIMA AUDIENSI DR. EYYA DAN DUTA AMERIKA	0	NA
----	---	-------------	--	---	----

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

isu pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu penting di negara Amerika Latin. Untuk itu pihaknya tertarik untuk bertukar informasi dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang juga menjabat sebagai Presiden Global Organization of Parleментарians Against Corruption (GOPAC).

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi pembukaan Kedutaan Besar Republik Costa Rica di Indonesia, dan berharap hal ini dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang.
- Delegasi Duta Amerika meminta masukan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam menyuarakan permasalahan HAM di Indonesia. Hal

12      V      17 JUN 2019      MENERIMA AUDIENSI DR. EYYA  
DAN DUTA AMERIKA

0      NA

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
MASA SIDANG V TAHUN 2018 - 2019**

ini menyusul tragedy meninggalnya 600 petugas KPPS dan dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan pada aksi 21 – 22 Mei 2019.

- Duta Amerika menyampaikan, masalah HAM merupakan salah satu isu sensitive di Amerika. Untuk itu, jika tragedi meninggal nya 600 Petugas KPPS pada Pemilu Serentak 2019 tidak mendapat tanggapan memadai dari pemerintah, maka harus diangkat di forum PBB.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkan mendukung seluruh usaha yang dilakukan Dr. Eyya dan Duta Amerika dalam mengangkat isu HAM di Indonesia pada ranah PBB. Namun, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengingatkan, seluruh informasi

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

yang disampaikan harus merupakan informasi yang valid, dan telah disampaikan oleh tim hukum.

13	V	18 JUN 2019	MENERIMA AUDIENSI BAPAK ASEP LUKMAN DKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audiensi Berjalan Tertutup</li> <li>- Marwan Batubara dan IKB UI meminta DPR melalui fungsi pengawasannya untuk memanggil dan mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan kasus kekerasan 21 – 22 Mei 2019 yang telah memakan korban jiwa.</li> </ul>	O	NA
14	V	21 JUN 2019	MENERIMA AUDIENSI MARWAN BATU BARA DAN IKB UI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IKB UI menekankan bahwa kekerasan aksi 21 – 22 Mei 2019 yang diduga dilakukan oknum aparat keamanan merupakan masalah kemanusiaan, dan bukan politis yang membutuhkan tindak lanjut serius dari Pemerintah.</li> </ul>	O	NA

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

15	V	29 AUG 2019	MENERIMA DUTA BESAR PAKISTAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Irwasum Polri pada tanggal 20 Juni 2019. Pada pertemuan tersebut diungkapkan bahwa Irwasum Polri telah membentuk Tim Pencari Fakta Internal untuk mengungkap peristiwa 21 – 22 Mei 2019.</li><li>- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima dan memahami aspirasi yang disampaikan Marwan Batubara dan IKB UI, dan akan mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk segera memproses laporan dan aspirasi tersebut.</li><li>- Duta Besar Pakistan H.E Mr. Abdul Salik Khan menyampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam</li></ul>	O	NA
----	---	-------------	---------------------------------	--	---	----

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

terkait masalah kemanusiaan di Kashmir, yang berada pada situasi penguncian penuh oleh Pemerintah India, dimana banyak praktik represi pada warga setempat.

- Duta Besar Pakistan H.E Mr. Abdul Salik Khan memohon dukungan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk memberikan *support* kepada Pakistan dalam pertemuan tertutup *UN Security Counselling* yang akan dilaksanakan pada waktu dekat.
- Duta Besar Pakistan H.E Mr. Abdul Salik Khan memohon kepada Parlemen Indonesia untuk memulai pembicaraan terkait krisis Kashmir di

**TABEL STATUS Pengerjaan Laporan Singkat  
Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM  
Masa Sidang V Tahun 2018 - 2019**

beberapa forum domestik maupun internasional.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyatakan Konstitusi Negara Indonesia selalu mengedepankan perlawanan terhadap segala bentuk represi di dunia, dan akan terus mendukung gerakan yang memperjuangkan HAM.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta kepada Duta Besar Pakistan H.E Mr. Abdul Salik Khan untuk memberikan data dan fakta mendalam terkait krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Kashmir.